



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
KOMISI VI DPR RI  
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK  
NEGARA (PERSERO), PT LEN INDUSTRI (PERSERO), DAN  
PT DANAREKSA (PERSERO)**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke-	:	31 (Tiga Puluh Satu)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 10 Juli 2024
Waktu	:	Pukul 15.54 s.d. 18.56 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat Acara	:	Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PDIP) Pembahasan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI)
Hadir	:	<b>A. ANGGOTA DPR RI:</b> 29 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F- PDIP)**

12 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Prof. Assc. Dr. Darmadi Durianto, S.E., M.B.A.
4. Rieke Diah Pitaloka
5. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
6. Sonny T. Danaparamita
7. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
8. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
9. Sondang Tiar Debora Tampubolon, S.T.
10. dr. H. Mufti A. N. Anam
11. Dr. Ir. Harris Turino, S.H., M.Si., M.M.
12. I Nyoman Parta, S.H.

2. **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PG)**  
5 dari 8 orang Anggota
  1. M. Sarmuji, S.E., M.Si
  2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
  3. Doni Akbar, S.E., M.M.
  4. Trifena M. Tinal, B.Sc.
  5. Drs. H. Dadang S. Muchtar
  
3. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)**  
1 dari 8 orang Anggota
  1. Mohamad Hekal, M.B.A.
  
4. **FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)**  
3 dari 6 orang Anggota
  1. Martin Manurung, S.E., M.A.
  2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
  3. H. Subardi, S.H., M.H.
  
5. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)**  
3 dari 6 orang Anggota
  1. Ir. H. M. Nasim Khan
  2. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
  3. Luluk Nurhamidah, M.Si., M.P.A.
  
4. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)**  
3 dari 5 orang Anggota
  1. Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.
  2. Muslim, S.H.I., M.M.
  3. Hj. Melani Leimena Suharli
  
7. **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F- PKS)**  
1 dari 4 orang Anggota
  1. Amin AK, M.M.
  
8. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)**  
1 dari 4 orang Anggota
  1. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.
  
9. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F- PPP)**  
0 dari 2 orang Anggota  
-

**B. UNDANGAN:**

1. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Darmawan Prasodjo) beserta jajarannya,
2. Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) (Bobby Rasyidin) beserta jajarannya,
3. Direktur Utama PT Danareksa (Persero) (Yadi Jaya Ruchandi) beserta jajarannya.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Teman-teman, mohon segera diminta untuk masuk ruangan.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan PT LEN Industri (Persero) dengan PT Danareksa (Persero), Masa sidang ke V, Tahun Sidang 2023-2024, 10 Juli 2024.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om swastiastu,*  
*Namo Buddhaya,*  
Salam kebajikan,  
Rahayu,

**Yang terhormat Pimpinan, dan  
Kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Saudara  
Darmawan Prasodjo,  
Yang terhormat Direktur Utama PT LEN Industri, Saudara Bobby  
Rasyidin,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Danareksa, Saudara Yadi Jaya  
Rohadi, Ruchandi,  
Tentunya beserta seluruh jajaran yang hadir,**

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala*, Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

**Bapak/Ibu, dan Saudara sekalian,**



Menurut laporan Sekretariat Komisi VI, rapat dengar pendapat hari ini telah dihadiri kuorum fraksi dan kuorum anggota. Dengan demikian, rapat dengar pendapat hari ini bisa saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.55 WIB)**  
**(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Apabila kita setuju, saya ajukan rapat hari ini kita akan akhiri pukul 17.30 menit maksimal, karena kita jam 7 akan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.

Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Direktur Utama PT LEN, dan Direktur Utama PT Danareksa yang telah menghadiri rapat dengar pendapat pada hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini membahas tentang Usulan Penyertaan Modal Negara Tahun 2025, yang sudah kita adakan pendalaman tentang PMN ini dengan rapat dengar pendapat sebelumnya maupun dengan FGD.

Karena beberapa hal tidak kita bisa bahas secara terbuka di dalam pendalaman mengenai dasar pemberian PMN, prasyarat pemberian PMN, kemudian dampak pemberian PMN, dan juga *excess-excess* pemberian PMN. Apalagi dalam situasi PMN tahun ini dalam keadaan tentunya penerimaan atau pendapatan negara yang tidak sesuai target.

**Bapak/Ibu, dan hadirin yang kami muliakan,**

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan melaksanakan tugas negara, BUMN dapat memperoleh Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Idealnya, BUMN dapat mencetak keuntungan dan disetorkan sebagai dividen untuk pendapatan negara dalam rangka sumber pembiayaan belanja untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan menyerap dana APBN untuk kebutuhan PMN. Oleh karena itu, diharapkan adanya optimalisasi dan penggunaan PMN untuk mendorong peningkatan kinerja PMN.

Mengacu kepada hasil Rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN pada tanggal 7 Juni 2024, bahwa terdapat Usulan Penyertaan Modal Negara untuk Tahun 2025, sebagai berikut:

1. PT Perusahaan Listrik Negara, sebesar Rp3.000.000.000.000,00;
2. PT LEN Industri, sebesar Rp2.000.000.000.000,00; dan
3. PT Danareksa (Persero), sebesar Rp2.000.000.000.000,00.

Khusus pada kesempatan RDP ini, agar waktunya lebih efisien karena sebelumnya sudah melakukan pendalaman dalam diskusi, sehingga bisa langsung meng-*address* pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan atau *concern*, pikiran, pendapat, saran, atau masukan dari Anggota Komisi VI



yang sudah disampaikan di dalam rapat-rapat sebelumnya ataupun pertanyaan tertulis yang kami kirimkan, maka bisa langsung oleh mitra kerja yang hadir pada kesempatan ini untuk bisa memaparkan hal-hal yang memang menjadi latar belakang dan menjadi tujuan serta kondisi objektif apa yang memang akan dipakai dana PMN ini untuk program-program yang bisa diurai secara detail dan transparan dan *accountable*.

Rapat ini terbuka, masyarakat akan melihat bahwa *cost* yang kita berikan lewat APBN tentu akan memberikan *benefit* yang lebih luas, terutama tentunya adalah hal-hal yang menyangkut masalah lapangan kerja. Dan juga kenapa kita harus menyelesaikan RDP ini? Karena terkait dengan usulan yang akan diberikan persetujuan pada saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN yang akan kita laksanakan pada malam ini.

Jadi, RDP ini dilaksanakan secara maraton, sehingga nanti pada saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Komisi VI DPR RI sudah bisa mengambil keputusan untuk kemudian menjadi bagian dari nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2024 yang akan datang. Yang pasti masih ada di Jakarta, di gedung DPR kita, karena di IKN belum jadi. Listriknya mungkin sudah, Pak Darmo.

Untuk itu kami persilakan kepada Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, setelah itu Direktur Utama PT LEN Industri, dan Direktur PT Utama PT Danareksa (Persero) untuk menyampaikan paparannya.

Waktu dan tempat kami persilakan.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semuanya,  
*Shalom,*  
*Om Swastiastu,*  
*Namo Buddhaya,*  
Salam kebajikan,

Jalan kepuncak lewati tanjakan  
Pulang ke kota bawanya ketan  
Hari ini cerah terasa menghangatkan  
Secerah Komisi VI yang membanggakan

**Yang kami hormati Ketua Komisi VI DPR RI, Pak Faisol Riza,  
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Pak Arya Bima,  
Pak Muhammad Sarmuji,  
Pak Muhammad Hekal,  
Pak Martin Manurung,**



**Serta seluruh Anggota Komisi VI, baik yang hadir secara *offline* maupun *online*,  
Yang kami hormati BUMN yang hadir, Dirut PT Len,  
Dirut PT Danareksa, dan juga  
Jajaran BUMN yang ada di sini,**

Mohon izin, lanjut.

Pertama, kami paparkan sekilas pandang mengenai PLN. Kami melayani 89 juta pelanggan, pendapatan kotor kami 487 triliun, kami mengelola 72 gigawatt pembangkit, 83.000 desa yang terlistriki, 71.000 km sirkuit transmisi, 166.000 MVA gardu induk dan 66.000 MVA gardu distribusi. Lanjut.

Sekilas pandang mengenai *profile* keuangan kita. Jadi, selama 5 dari 2019 sampai 2023, kalau kita melihat total pendapatan kami meningkat dari 359 triliun, di tahun 2023, meningkat menjadi 487 triliun. Total hutang kami yang tadinya 453 triliun di 2019, berhasil kami turunkan menjadi 396 triliun di tahun 2023. Kemudian juga kalau kita melihat dari net profit atau laba bersih, kinerja keuangan PT PLN (Persero) juga semakin membaik. Dari 2019 laba bersih yaitu 4,32 triliun dan di tahun 2023 meningkat menjadi 22,1 triliun.

**F-PDIP (DR. IR. HARRIS TURINO, S.H., M.SI., M.M.):**

Izin, Pimpinan. Mungkin langsung masuk ke ini saja, apa, PMN. Alasannya diperkuat yang kemarin, yang ini *kan* sudah dipresentasikan.

*Makasih.*

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Kemudian, langsung saja ke *slide* 6, bagaimana investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Langsung *aja*. Investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T, yaitu Terdepan, Terluar, dan Tertinggal, itu adalah 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan di daerah non 3T. Dan di sini kami menghitung dengan *rate of return* dari program-program untuk listrik desa ini sekitar 2-3%, sehingga di sini kalau kita lihat di sebelah kiri adalah investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan untuk rumah-rumah di daerah non 3T, itu rata-rata sekitar 2 sampai 2,5 juta per rumah per pelanggan. Sedangkan untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di daerah Jawa-Bali adalah sekitar Rp18,5 juta per pelanggan. Untuk Sumatera-Kalimantan rata-rata 38,7 juta per pelanggan, dan juga Regional Sulawesi-Maluku-Papua sekitar 35,3 juta per pelanggan. Lanjut.

Nah, untuk itu, PLN mengajukan PMN Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pembangunan listrik menuju rasio elektrifikasi 100%. Dan ini adalah landasan pertama adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kemudian juga ada Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan ini untuk Undang-Undang Ketenagalistrikan ini



terutama adalah Pasal 3 ayat (1), yaitu penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Kemudian, Pasal 4 ayat (3)d., khususnya itu menyebut untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pemerintah dan pemda, menyediakan dana untuk pembangunan listrik desa. Jadi, ini sudah disebut dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyebut bahwa pemerintah memang harus menyediakan dana untuk khusus, yaitu listrik desa.

Kemudian, di sini juga adanya Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dan juga ada Perpres mengenai RPJMN. Tapi untuk RPJMN ini kemarin sudah dibahas, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024, Pak, Pak Harris. Tapi memang di atasnya masih ada Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyebut bahwa untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud, pemerintah menyediakan dana untuk pembangunan listrik desa. Jadi, pasalnya ternyata sudah masuk ke dalamnya, ya begitu. Jadi, terima kasih Bapak atas masukannya di mana ini harus jelas *nih* aturannya seperti apa dan memang sesuai undang-undang sudah masuk ke dalamnya.

Nah, untuk itu, lanjut. Kami sudah membangun *roadmap* listrik desa untuk mencakup 35 provinsi, 192 kabupaten, 548 kecamatan dan 1092 desa. Lanjut.

Dan tentu saja dalam hal ini kami mengubah sistem yang dulunya berbasis pada manual menjadi sistem yang berbasis pada digital, berbasis pada spasial, sehingga penghitungan bagaimana kita menyambungunya itu menjadi jauh lebih akurat dan juga RAB, rencana anggaran belanjanya, juga jauh lebih presisi. Lanjut.

Nah, untuk itu ada perubahan besar dalam tata kelola listrik desa di dalam PLN, yaitu kami membentuk divisi khusus Lisdes. Kemudian, dari *text-based* yang tentu saja sulit sekali kalau membaca dokumen yang sampai 4.000 lembar dan kita tidak tahu lokasinya ada di mana, kita ubah menjadi spasial dan juga digital. Kemudian, kita membangun *roadmap*. Kemudian, kita juga membangun *end-to-end integrated planning*. Kemudian, kami juga melakukan *stakeholder engagement*. Lanjut.

Nah, untuk itu bagaimana kami membangun pemetaan yang berbasis pada spasial. Satu per satu, ini salah satu contoh di Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur, Provinsi Aceh. Lanjut. Ini contoh lagi yang lain di Jayapura. Jadi, kelihatan sekali bagaimana detailnya. Di mana *existing* infrastruktur kita, kemudian di mana rumah-rumahnya dan bagaimana cara *nyambungunya*. Mana yang harus membutuhkan transmisi tegangan menengah, mana yang membutuhkan transmisi tegangan rendah. Dan untuk itu PLN telah melakukan pemetaan berbasis *geospasial* agar implementasi program Lisdes ini bisa dilakukan secara menyeluruh *end-to-end* sampai tuntas. Lanjut.





Ini adalah, dan untuk itu, kami juga sudah memerintahkan setelah *spasial Planning, Digital Planning* ini. Kemudian, dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di daerahnya masing-masing. Ini setiap GM telah bertemu dengan para gubernur, kapolda, pangdam dan lain-lain untuk mendapatkan dukungan, agar program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara, program pemerintah di mana kita menjalankan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan. Lanjut.

Nah, untuk ini adalah ini PMN. Dan memang kalau kita melihat di sini, PMN di tahun 2023 dan PMN 2024, ini kami tidak mendapatkan PMN tersebut. Lanjut, *next*.

Dan untuk itu, kami mengajukan alokasi PMN untuk program Lides senilai 3 triliun di tahun 2025 untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100% di tahun 2027. Dan ini targetnya adalah 192 kabupaten, 548 kecamatan, 1.092 desa, jumlah pelanggannya adalah 85.000. Kapasitas nanti ada sebagian memang di daerah yang sangat terisolasi, sehingga kami membangun juga pembangkit listrik berbasis pada tenaga surya, yaitu 19.000 kilowatt-peak. Kemudian, jaringan tegangan menengah, ini 20.000 volt, 2.388 km *circuit*, jaringan tegangan rendah 1.692 km *circuit* dan juga gardu distribusi 54.930 kVA. Lanjut.

Dan kalau kita melihat, kita telah merencanakan *roadmap* Lides untuk mencapai target rasio desa berlistrik 100% di tahun 2024. Dan kalau kita lihat di tahun 2023, untuk program Lides, kita mengalokasikan 4,75 triliun dan ini berbasis pada anggaran internal dari PLN. Dan untuk, dan ini meliputi hampir 2.000 desa, 211.000 pelanggan dan di sini jaringan tegangan menengahnya 7.700 km *circuit*, jaringan tegangan rendahnya 4.800 km *circuit* dan juga, ada juga gardu distribusi.

Jadi, ini adalah memang alokasi anggaran dari internal PT PLN yang digunakan untuk menjalankan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan untuk 2024, kami mengalokasikan anggaran dari internal PLN sebesar 1,47 triliun dan ini memang jumlah desanya menurun, yaitu menjadi sekitar 149 desa, 20.000 pelanggan. Kemudian, jaringan tegangan menengahnya sekitar 7 km, jaringan tegangan rendahnya 157 km. Dan untuk 2025, kami mengajukan Rp3 triliun. Lanjut.

Dan di sini kami juga bisa menakar bagaimana dampak *multiplier effect* dari listrik desa, termasuk lapangan kerja, kualitas pendidikan, sektor kesehatan, produktivitas sektor industri, sektor dari Marine dan juga meningkatkan sektor di *agriculture*. Lanjut.

Dan juga dalam hal ini, kami juga melakukan analisa ekonomi sosial secara mikro. Dengan, baik itu pendapatan asli daerah, tambahan penerimaan pajak, pertumbuhan domestik regional bruto di tingkat desa,



kemudian juga menurunkan tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lanjut.

Dan ini adalah perbandingan apabila kita menggunakan PMN Tahun Anggaran 2025 atau tanpa PMN Tahun Anggaran 2025. Dan kami dengan terpaksa juga menyediakan pendanaan dari *commercial loan*, di mana ada perbedaan yang sangat besar, yaitu ada tambahan beban bunga sekitar 1,55 triliun dibanding apabila menggunakan PMN. Dan juga ada penambahan subsidi kompensasi sebesar 1,57 triliun, hanya apabila ini kita mengalokasikan anggaran sebesar 3 triliun. Lanjut.

Dan untuk itu kami menjalankan prinsip tata kelola yang baik, *compliance*, dan juga efektif, efisien dari perencanaan, penganggaran, *monitoring*, dan evaluasi maupun auditnya. Lanjut.

Ini adalah beberapa gambaran. Ini ada di Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara, Kabupaten Selatan, Sumatera Utara, di tengah adalah di Kalimantan Utara, di sebelah kanan, Papua Pegunungan. Lanjut.

Di sini ada juga di sebelah kiri adalah Sulawesi Barat, di tengah adalah Nusa Tenggara Timur, di sebelah kanan di Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua. Ini di 27 Oktober 2023. Lanjut.

Ini adalah di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Lanjut, ini di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Lanjut lagi, ini di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat di Desa Pusu, Kabupaten Bima. Lanjut, ini di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lanjut, ini di Kepulauan, di Kabupaten Walea Kepulauan, Sulawesi Utara. Lanjut, ini di Kampung Gayong, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut, ini di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Lanjut, ini di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara dan juga di sebelah kanan adalah di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Lanjut, ini juga di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, di sebelah kanan di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Kemudian selanjutnya di, ini Lisdas di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Nah, ini di Situbondo. Lanjut.

Nah, untuk itu sekali lagi Bapak/Ibu,

**Bapak-Bapak Pimpinan, dan juga  
Bapak/Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati,**

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas saran, bimbingan, dukungan. Dan kami dari PLN siap untuk menjalankan amanah Komisi VI DPR RI untuk menghadirkan listrik di seluruh pelosok tanah air Republik Indonesia serta menjalankan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia di mana kita tidak bisa membiarkan ada keluarga kita, saudara-saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan.



Segelas kopi di atas nampan  
Teman lembur kerja seharian  
Langkah PLN kokoh ke depan  
Dukungan Komisi VI jadi pedoman

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Memang kita lembur seharian, sampai tadi malam kita juga baru selesai jam 12.00 *nih*, Pak. Ini nanti lanjut jam 7.00.

Memang 2023 kemarin *enggak* dapat PMN, Pak. Mungkin karena belum naik haji. Nah, setelah naik haji, mungkin bisa dapat *nih*. Naik hajinya bareng Pak Hekal. Pak Ketua di sini, dua yang naik haji. *Moga-moga* berkat untuk PLN.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Amin.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Pak Bobby Rasyidin, kami persilakan dari LEN.

**DIREKTUR UTAMA PT LEN INDUSTRI (BOBBY RASYIDIN):**

Terima kasih, Pak Pimpinan.

izin kami sesuai dengan rapat pendalaman kami kemarin. Itu kami menampilkan rencana strategis *holding defend* ID untuk tahun 2025-2029, sekaligus itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan *feedback* yang kami terima dalam rapat pendalaman tadi malam.

Langsung *aja* ya. Mohon izin, Pak, langsung. Mohon izin penyampaian, *roadmap* dari Defend ID ini sampai dengan tahun 2045 itu kita susun sesuai dengan Ringkasan Eksklusif, Eksekutif Visi Indonesia Tahun 2045. Kami mengambil tiga poin penting di sini: Satu, adalah ketertiban masyarakat yang inklusif, itu meliputi identitas bangsa Indonesia di atas identitas suku bangsa, agama, ras, dan golongan, itu yang pertama.

Yang kedua adalah pertahanan berdaya gentar tinggi, yaitu kekuatan pertahanan berbasis *smart power* didukung anggaran pertahanan sebesar 1,5%. Pada saat ini anggaran pertahanan kita itu cuma 0,78% dan perlu kita *ketahui* juga rata-rata di dunia itu, itu 2%. 2%, jadi, kita masih jauh, anggaran pertahanan Indonesia itu masih jauh di bawah rata-rata dunia. Sehingga



dengan demikian, pertahanan berdaya gentar tinggi ini, kami menyusun langkah-langkah, *roadmap* kami adalah:

1. Mewujudkan pemenuhan alutsista berteknologi modern. Apa yang kami maksud dengan teknologi modern di sini? Tidak semua teknologi kita adopsi adalah teknologi-teknologi yang sangat kritis dan sangat strategis buat pertahanan, buat konsep dan strategi pertahanan kita;
2. Dalam menciptakan industri Hankam yang sehat, kuat, maju, mandiri dan berdaya saing;
3. Tentunya menjadi pelaku global utama global *supply chain*.

*Next, next* berikutnya. Adapun kami mengambil asumsi untuk membangun *roadmap* ini, itu ada lima faktor penting:

- Faktor pertama adalah geopolitik dan ketegangan di kawasan. Seperti kita *ketahui*, bahwa Indonesia ini merupakan spot potensi-potensi konflik yang cukup tinggi juga. Kita tahu di Laut Cina Selatan, potensi konflik yang tinggi, kita punya konflik *insurgency* juga yang ada di Papua dan di tambahan itu, Indonesia ini dikelilingi oleh empat MEB. MEB itu adalah *Marine Expeditionary Brigade*. Itu ada empat, satu di Palau, satu di Filipina, satu di Darwin, dan satu lagi armada ketujuh, sehingga kalau kita lihat posisi, posisi Indonesia ini, itu adalah potensi untuk konflik global juga;
- Yang kedua adalah isu-isu ekonomi dan perbatasan. Kalau kita lihat adalah ancaman langsung dari pengambilan sumber daya ilegal, antara lain pene, pene, pene, penebangan liar, pencurian ikan oleh kapal nelayan asing;
- Faktor ketiganya adalah kejahatan antar negara;
- Faktor keempatnya adalah konflik domestik pada saat ini seperti yang saya sampaikan tadi; kemudian di samping adalah
- Kemunculan isu-isu lain. Ancaman tidak langsung dari perubahan iklim, bencana alam yang dapat memicu krisis pangan, air, energi dan konflik terbuka.

*Next*. Ini kami gambarkan itu adalah 10 teknologi Hankam yang saat ini berkembang pesat dan menjadi tren di global. Kalau kita lihat disitu ada:

1. AI;
2. Ada *Advanced Defence Equipment*;
3. *Robotics dan Autonomous System*;
4. *Internet of Military Things*. bukan IoT, tapi IMT;
5. *Cyber Warfare*;
6. *Immersive Technologies*;
7. *Additive Manufacturing*;
8. *Big Data & Analytics*;
9. 5G; dan
10. *Blockchain*.



Nah, ini ditranslasikan kepada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021, di mana kami dapat penugasan untuk pengembangan 10 teknologi Hankam Indonesia. Yang kami petakan itu dengan dua dimensi:

1. Penguasaan teknologi kunci prioritas. Program prioritasnya itu ada 10 yang digambarkan di sini;
2. Membangun teknologi pendukungnya;
3. Membangun teknologi informasi dan komunikasi. Ini terutama untuk yang kita kenal dengan *Network Centric Warfare* atau NCW;
4. Membangun sistem komunikasi dan navigasinya. Itu yang berbasis satelit militer, program ini telah dikontraskan kepada kami, *Insyah Allah* tahun 2026 dan 2027 kita mempunyai empat satelit observasi di atas Indonesia;
5. Pemanfaatan untuk kepentingan pertahanan. Seperti yang kami sampaikan tadi mencakup AI, *Big data*, *machine learning*, sistem otomatis atau *Autonomus*, serta teknologi robotik.

Selanjutnya, kami juga meng-*highlight* keberhasilan atau indikator kemandirian Alpalhankam ini. Itu kami lihat dari kemandirian Alpalhankam itu sendiri, kesiapan Alpalhankamnya. Kemarin waktu pendalaman telah kami sampaikan juga, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pada saat ini kami mempunyai kontrak *on hand* itu 109 triliun dari hampir 200 triliun sejak tahun 2020. Dan kita harapkan di tahun 2029 itu kita akan punya sekitar 220 triliun kontrak *on hand* dengan *band rate* sekitar 22% itulah yang menghasilkan pendapatan 57 triliun di tahun 2029.

Integrasi sistem pada saat ini kita ketahui, bahwa perang itu bukan per matra lagi, *tapi* adalah antarmatra yang terintegrasi, yang akan kita jahit dengan teknologi yang namanya NCW (*Network Centric Warfare*). Penguasaan-penguasaan teknologi-teknologi tadi juga merupakan indikator kami. Kemudian, kemarin juga ada pendalaman mengenai kompetensi SDM. Ini merupakan prioritas indikator kami juga untuk meningkatkan kemampuan SDM dan tentunya kita melihat indikator yang paling penting adalah keberlanjutannya. *Next*.

Sehingga kami *summary*-kan, untuk 2025-2029 di bidang pertahanan, isu strategi seperti yang saya sampaikan tadi, dampak dari beberapa konflik dan konfliknya juga sudah berevolusi. Tidak konflik yang, yang konvensional lagi, tapi konflik yang sifatnya kompleks, sarat penggunaan senjata *chemical*, *biological*, *radioactive*, *nuclear* dan *high yield explosive*.

Kemudian, isu-isu strategis pertahanan. Seperti yang kami sampaikan tadi adalah *insurgency* konflik internal termasuk konflik sosial dan serangan terorisme. Sehingga sasaran pembangunan, kalau kita lihat itu API-nya Indonesia, seperti yang kami sampaikan tadi, *Asia Power Index* itu naik dari 60 menjadi skor 62-68. Kita sekarang di posisi kesembilan.

Kemudian, GMI kita juga naik dengan, terutama dengan memperkuat industri pertahanan. *Highlight* intervensinya kalau kita lihat itu intensifikasi perundingan selain membangun industri pertahanan, membangun kekuatan pertahanan, kita juga memerlukan intensifikasi perundingan. Peningkatan kemampuan pertahanan, pembangunan, dan pengembangan industri pertahanan nasional. *Next*.

Nah, kalau kita lihat *roadmap* dari tahun 2024 sampai tahun 2034, kami bagi tiga tahapan:

1. *Short term*-nya, yaitu adalah *Stability* dan *Enhance Financial Performance* kami, karena memang empat dari perusahaan ini dalam keadaan kinerja keuangan yang selama ini tidak dalam keadaan baik. Jadi, kami dalam hal ini melakukan tiga hal sekaligus, restrukturisasi korporasi yang secara holistik dan komprehensif, kami melakukan transformasi bisnis juga dan kami melakukan ekspansi terhadap *core* kompetensinya kami;
2. Dalam *Mid term* tahun 2025-2029, ini kami sebut dengan *Domestic Defence and Security Industry Champion*. Jadi, dengan dibentuknya DEFEND ID ini, maka kita mempunyai kemampuan untuk membuat yang namanya konglomerasi dari industrial ekosistemnya. Di mana *champion*-nya adalah DEFEND ID yang kita harapkan untuk industri lokalnya;
3. *Long term*-nya. Itu menjadi *Regional Player Defence and Security Industry*.

*Next*. Kongkritnya, kongkritnya seperti yang ada di *slide* ini. Pada saat ini 2024-2025, Pindad itu *lead conglomerate*, industrial *conglomerate*-nya di *land platform, weapon and ammunition*. Kita punya tiga portofolio pada saat ini, senjata, amunisi, dan kendaraan khusus, diharapkan di tahun 2029 itu ada penambahan 16 lini bisnis lagi atau lini teknologi lagi.

Meliputi penambahannya itu adalah:

1. Medium tank APC; kemudian
2. Kendaraan elektrik, *light tank*, Anoa 3; kemudian,
3. Di persenjataan itu ada senjata yang laras lebih pendek atau yang kita sebut dengan AM1. Kemudian, pengembangan teknologi RCWS, ini untuk *remote control weapon system*. Kemudian, *night vision goggles* untuk peralatan pendukung, dan RCWS *lite*, RCWS yang sifatnya lebih ringan;
4. Kita pengembangan juga munisi-munisi tank seperti yang kami sampaikan kemari. Munisi kaliber besar mulai dari kaliber 55 dengan prioritas di kaliber 105, Granat Mortar;
5. Multi Harvester, Booster, Bulk Emulsion, AN, Compactor.

Itu yang pengembangan sampai 2029, itu di Pindad.



Kemudian, di Dirgantara Indonesia. Dirgantara Indonesia ini *Aerospace platform*. Pada saat ini, kami mempunyai:

1. Pesawat *ingeniously home ground* CN235, 212 dan 219.
2. Helikopter, bekerja sama dengan Bell, bekerja sama dengan Sikorsky Blackhawk dan bekerja sama dengan Airbus. Seperti yang kami sampaikan kemarin itu ada H225, ada Sikorsky S71, S70, *sorry*. Kemudian, ada pengembangan kita dengan Lockheed Martin juga untuk modernisasi C130.
3. Aircraft Services MRO, pada saat ini juga ada.
4. Helikopter *Services*,
5. *Aircraft Modification*, dan
6. *Engine Services*, itu ada di anak perusahaan di PT NTP.

Di tahun 2029, kami mengharapkan ada lima lini teknologi yang baru, itu meliputi:

1. N219 Amphibious. Ini kita dalam tahap pengembangan sekarang dengan Bappenas dan kita menaikkan *payload* dari N219 itu dari 1,6 ton menjadi 2,2 ton *payload*-nya. Kemudian,
2. Pengembangan UAM (*Urban Air Mobility*),
3. Roket 70 mili,
4. Rudal C-705; dan
5. Tentunya dengan pengembangan EWP (*Engineering Work Package*).

Di PT PAL, pada saat ini kami mempunyai kapal perang atas permukaan, kapal perang bawah permukaan, pemeliharaan dan perbaikan dan jasa lainnya. Di tahun 2029, kami mengharapkan ada penambahan lini teknologi yang baru, yang meliputi:

1. KCR Class;
2. OPV Class;
3. Mother Ship;
4. *Design Movable Power Plant*;
5. Penginderaan bawah laut; kemudian
6. UUV untuk *Unmanned Underwater Vehicle*;
7. *Autonomous Underwater Vehicle*.

Di Dahana, kami pada saat ini mempunyai *explosive manufacturing, related servicesnya, defence related, Bomb, dummy, smart bomb* yang kami punya sekarang. Kemudian, ditambah lagi dengan drone yang sifatnya *lotering*. Di tahun 2029 diharapkan kita akan menambah portofolio kita itu adalah:

1. Bom NATO,
2. Drone Kamikaze,
3. Rudal Panggul,
4. Composite Propelan,



5. Produk SLT,
6. Emulsion for Underground,
7. High VOD Emulsion,
8. Pabrik AN, tentunya pengembangan dari luar Jawa kita ekspansi ke Jawa.

Kemudian, di PT LEN yang pada saat ini *Defence Electronics and Critical System*. Kita *udah* mempunyai teknologinya:

1. C2;
2. *Communication System*;
3. *Surveillance/Observation/Sensor System*;
4. *Weapon Control System Electronics Warfare*;
5. *Simulator and Learning Management System*; serta
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Penambahan ke depan seperti yang saya sampaikan tadi adalah:

1. NCW (*Network Centric Warfare*); kemudian
2. IMIN, *Imaginery Intelligent*. Itu untuk penginderaan-penginderaan dari berbasis data satelit;
3. *Big Data, Data Center and AI Digital Solution*;
4. *Air and Road Transportation*. Ini bidang non militernya; serta
5. Bagaimana kita me, me, menguasai teknologi integrasi dari antar platform ini.

*Next.*

Sampai tahun 2029 itu kami menghitung investasi, itu sekitar 7,41 triliun, di mana kami harapkan itu dari PMN sampai dengan tahun 2029 itu 46,8%, 43% itu adalah pengembangan mandiri kami sendiri, sedangkan 7,9% itu pengembangan dengan *partnership*.

Demikian kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa meng-cover semua pertanyaan dan *feedback* yang kemarin pada saat pendalaman.

Demikian, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Terima kasih dari PT LEN Industri.

Selanjutnya kami persilakan, Bapak Yadi Jaya Ruchandi dari Direktur Utama PT Danareksa.

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Baik, terima kasih, Bapak Pimpinan rapat.





**Bapak/Ibu sekalian,  
Pimpinan Komisi VI yang saya hormati dan,  
beserta anggota, dan tentunya  
Dirut dan Direksi BUMN yang ada saat ini,**

Izin, Pak, saya langsung saja. Tadi kemarin *kan* sudah dilakukan pendalaman dan coba banyak sekali pertanyaan terkait dengan peran daripada Danareksa, mungkin saya coba menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan Danareksa itu, katanya memang. *Sorry? Oke.*

Iya, mungkin saya akan coba jelaskan kembali apa peran dari Danareksa itu seperti apa, dikaitkan dengan PPA, Pak. Jadi, memang tadi disampaikan bahwa kami ini fokus kepada peningkatan skala bisnis anak perusahaan yang sudah *diimbangkan* dan sudah disehatkan atau yang memang skala bisnisnya masih kecil, *gitu ya*. Sehingga kalau kita *benchmark* ke negara lain, ini adanya orang bisanya meng, meng apa, menganalogikan dengan 6 COPA, *Nasional Asset Management Company*.

Jadi, memang fokusnya itu adalah kepada pengembangan skala bisnis dari anak-anak usaha yang telah *diimbangkan* dan juga mendukung program penyederhanaan BUMN. Jadi, apa yang sudah *diimbangkan* kepada kami akan tetap ada di kami untuk berusaha dijadikan perusahaan yang signifikan, yang memberikan manfaat yang lebih besar.

Kemudian, juga kenapa Danareksa, *gitu ya*. Danareksa, sebelumnya Danareksa memang fokus kepada *investment*, tapi sekarang *investment* di *paper*, tapi sekarang investasi kepada real aset, Pak. Tapi memang secara *core competence* tetap sama, ini adalah *investment*. Dan untuk kita menjalankan amanah yang dilakukan ini memang, setelah kita *diimbangkan* memang kita memerlukan ekuitas sebagai, istilahnya *cash money*, *gitu ya*, sebagai, apa, pengelolaan *resiko* yang baik.

Karena memang ada untuk peningkatan skala bisnis, ada yang harus menjadi *equity portion*, walaupun nanti kita sampaikan bahwa IRR-nya memang baik jika memakai *loan*, tapi tetap kita memohonkan ada *equity portion* dalam, dalam peningkatan skala bisnis, untuk memastikan pengolahan *resiko* yang berkeseluruhan dan ini hanya menjadi katalisator, Pak.

Kalau nanti kita sampaikan, juga tadi disampaikan bahwa sebetulnya *equity money* yang disampaikan kepada per *project* ini hanya sebagian kecil dari total *project cost*. *Enggak* ada yang lebih dari 25%, bahkan adanya belasan persen, kecuali penugasan yang disampaikan kepada kami itu hampir seluruhnya itu di, apa, akan dibiayai lewat ekuitas.

Demikian, Pak, ini bisa saja kita sampaikan bahwa sebetulnya kita ini melakukan penyehatan lanjutan. Jadi, sebagai contoh, apa yang sudah dilakukan di PPH *hard restructuring*, restrukturasi kelas berat. Kemudian, dilanjutkan di Danareksa untuk restrukturasi lanjutan, Pak. Sehingga kita



memilih beberapa *project* yang ada di sini, seperti kami sampaikan, apa, tadi malam, ada pengembangan kawasan industri, SPAM, maupun Persero Batam, ini sebetulnya untuk memastikan mereka masuk ke dalam *core competencies*-nya mereka dan juga membawa manfaat, bukan hanya kepada perusahaannya, tapi membawa manfaat kepada ekosistemnya sendiri.

Jadi, kita ingin, apa namanya, pastikan, sebagai contoh, kita memberikan pendanaan ekuitas sebagai katalisator contohnya di kawasan industri, itu dipakai dimaksudkan untuk juga meningkatkan *foreign direct investment* contohnya, dan meningkatkan peningkatan pendapatan daerah sekitar dan meningkatkan pendapatan para pekerja yang ada di, yang ada di sekitar, di mana BUMN itu berada, eks BUMN itu berada.

Sehingga, Pak, yang kami sampaikan kemarin juga kami mengusulkan 2 triliun untuk membaginya menjadi 5 *project*. Empat *project* itu adalah memang menjadi *core* bisnis kami, yang kelima itu adalah sifatnya penugasan. kemudian juga kemarin ditanyakan, kenapa Danareksa masuk ke KEK Pangan Dan Kedaulatan Pangan dan Energi? Tapi sebetulnya bukan itu poinnya, poinnya adalah kita diminta untuk mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan kawasan industri yang ada, Pak, di sana.

Jadi, nanti kita sampaikan lebih lanjut seperti apa *sih* kawasan KEK itu? Karena ini hanya merupakan agen menjadi katalisator supaya nanti ada investor yang akan berinvestasi di kawasan *on farm* maupun *off farm*-nya, kira-kira *gitu*. Lanjut, Pak.

Ini kami *summary*-kan kembali, kemarin, kemarin ada pertanyaan terkait dengan NPV-nya. Yang tabel atas itu adalah terkait dengan indikator kelayakan investasi, yang di bawah ada kelayakan indikator ekonomi. Kalau indikator kelayakan investasi, ini sudah kami, apa namanya, proyeksikan bahwa ini semuanya positif, Pak. Berikut juga dengan NPV, dan ini kalau dilihat sebagai contoh di KIMA, porsi PMN-nya hanya 22,6% dari total Project 1 triliun, Pak. Sisanya itu akan dilakukan pendanaan dari perbankan, kira-kira *gitu*.

Kecuali, Pak, kecuali yang KEK Ketahanan Pangan dan Energi, itu ada 97% pendanaannya dan itu semua kita harapkan dari alokasi dari PMN yang kami mohonkan. Dan di sini kemarin dari pertama mengenai NPV, kami juga sampaikan dan juga di bawah ada kelayakan ekonominya, Pak, termasuk ekonomi IRR, NPV maupun *cost and benefit ratio*. Lanjut, Pak.

Ini saya hanya meng-*address* beberapa *concern* yang ada tadi malam. Ini adalah *strategic important* usulan PMN kami. Itu kami mencoba melakukan, apa namanya, penajaman atas apa yang kami sajikan sebelumnya.

Jadi, sedikit saya mengulang sedikit, Pak, bahwa pengembangan kawasan industri ini bukan tadi, yang saya sampaikan, bukan hanya memastikan si penerima PMN ini, eks BUMN ini mendapatkan manfaatnya,



tapi juga kita juga coba melakukan, apa, meng-*capture* relokasi industri yang sekarang lagi tren keluar dari *mainland* China untuk menghindari *trade war* dengan Amerika. Dan itu yang yang kita ingin *capture*, sehingga membawa manfaat. Dan memang di samping tersebut memang sisa lahan dari KIW hanya 13% dan KIMA hanya 4,78%. Dan ini yang kami maksud dengan bagaimana kita berinvestasi untuk memastikan BUMN ini, eks BUMN ini bisa dilakukan peningkatan skala bisnisnya.

Kemudian, mungkin saya ingin menjelaskan terkait KEK kembali, Pak, bahwa ini adalah merupakan penugasan yang diminta Danareksa melakukan, memimpin untuk kolaborasi, Pak. Nanti kita sampaikan, ada, apa, presentasi khusus terkait dengan hal ini.

Mungkin langsung saja, Pak. Ya, ini kita ingin menggambarkan, *next-nya*. *Next-nya* kami menggambarkan sebetulnya apa *sih* yang telah dilakukan semenjak sebelum kawasan maupun perusahaan ini *diimbangkan* dan selama dua tahun terakhir ini kami sedang lakukan dan ke depannya akan seperti apa.

Sebagai contoh, Pak, kami sampaikan di kawasan industri banyak pengolahan utilitas maupun kebijakan penguasaan itu belum terstandarisasi. Yang kita lakukan adalah mereka melakukan standarisasi atas pengolahan standar utilitas. Tadinya semuanya itu di, apa, bisa penyediaan air itu dilakukan oleh orang lain, tapi kita mencoba mengembalikan marwah dari operator di kawasan industri dengan cara mengambil alih, apa namanya, penyediaan utilitas itu dan akan dioperasikan sendiri oleh kawasan industri.

Begitu juga kami melakukan penerapan manajemen *resiko*, Pak, terkait dengan pengolahan *resiko* yang akan terpusat. Seluruh keputusan investasi kami tarik ke atas, Pak, untuk memastikan tidak ada *resiko* yang mereka ambil atau anak-anak usaha ini ambil, yang tidak sesuai dengan *list appetite* yang kami tentukan.

Jadi, pengeluaran *resikonya* sangat kita jaga untuk memastikan ini bisa di-*manage* dengan lebih baik dari sebelumnya dan ini tergambar dari *numbers-nya*, Pak. Jadi, sebagai contoh, kemarin juga ada pertanyaan terkait dengan KIW, disebutkan bahwa pendapatannya masih 100 juta. Mungkin saya sedikit koreksi, Pak. EBITDA-nya di tahun lalu itu ada 81 miliar dan itu secara *revenue*, meningkat, Pak, dari sebelumnya di tahun 2021, 125, sekarang di akhir tahun ini kita proyeksikan menjadi 280 dan terus akan naik dengan adanya injeksi dana PMN yang tadi, sebagai katalisator, dan akan kami *recycle*, Pak.

Sebetulnya setelah kita, setelah kita, apa namanya, injeksikan, kemudian ada *return-nya*, kemudian akan kita *recycle* untuk beberapa *project* yang lain yang memang banyak BUMN yang, yang diamanahkan kepada kami. Sebagai *reminder* aja, kami sekarang mengelola sekitar 21 perusahaan dan yang ada di Danareksa, dan 21 perusahaan yang ada di, apa namanya, di PPA.



Ini di *number-number* ini menggambarkan, apa namanya, semenjak dari 2021 sampai dengan 2024, di mana 2021 adalah sebelum mereka *diimbangkan* sampai dengan proyeksi akhir tahun ini. Ini menunjukkan gambaran yang positif. Dan kita ingin mempunyai istilahnya level atau katalisator, sehingga mereka akan bertumbuh dengan lebih signifikan.

Izin, Pak, saya langsung saja ke contoh *project*. Tadi malam juga ditanyakan. *Next*-nya.

Ini contohnya di KIMA, Pak. Ini yang ditanyakan kemarin adalah PMN-nya apakah dapat dalam bentuk KSO? Tapi memang PMN-nya memang kepada kami, Pak, kepada Danareksa. Jadi, bukan kepada anak-anak usaha, jadi PMN-nya kepada Danareksa. Dan itu di, apa namanya, dipastikan melalui untuk mengembangkan lahan baru. Di sini disampaikan sebesar 100 hektar, sisanya yang tadi sekitar 1,1 triliun itu akan kami dapatkan pendanaannya dari institusi perbankan dan ataupun keuangan lainnya.

Jadi, porsi PMN di sini hanya 22,6%. Memang di sini seperti disampaikan tadi malam juga, IRR *project*-nya tanpa PMN adalah 13,5, tapi dengan PMN lebih tinggi. Kenapa? Karena sebagai contoh, Pak, ini kalau, apa, serapan PMN atas KIMA ini akan selama dua tahun ke depan. Jadi, dari 240,9 ini akan terserap dua tahun ke depan, tapi pengembalian dari, pengembalian dari investasinya sendiri itu kisarannya itu 7 tahun, Pak. Selesai 7 tahun semuanya, sebesar 100 hektar. Nah, itu kalau kita biayain dengan *loan*, itu akan ada *interest* yang mengakumulasi.

Jadi, itu istilahnya kita kejar-kejaran dengan *interest* yang akan dibayar. Dan ini sebagai contoh, Pak, ini adalah salah satu kenapa BUMN-BUMN karya kita itu pada jatuh, karena membiayai proyek dengan hutang. Membiayai, apa, yang sifatnya ekuitas dengan hutang, sehingga bahkan ada hutang yang *interest expense* yang dikapitalisasi, sehingga setiap tahun, apa, nilai investasinya naik. Kalau kita biayain dengan ekuitas, itu memberikan fleksibilitas yang cukup untuk *manage resiko* dengan lebih baik, sebetulnya begitu. *Next*-nya.

Ini terkait dengan KIMA eh KIW, sebetulnya hampir sama, Pak, jadi saya lewatin aja. *Next*-nya. Ini terkait dengan Persero Batam. Tadi malam juga sudah disampaikan, walaupun Persero Batam, ini adalah tahapan yang ketiga. Bapak-Bapak sekalian sudah ke sana, itu melihat tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga itu adalah untuk berinvestasi kembali dan mempertahankan kepemilikan dari Persero Batam sebesar 51% dan ini konsesinya selama 37 tahun ke depan.

Dan ini tadi di depan digambarkan, bahwa ini akan menghasilkan pendapatan-pendapatan Persero Batam yang cukup signifikan karena mereka mengelola secara, anggaplah monopoli di Batu Ampar. Dari sekarang sekitar hanya 100 miliar *revenue* akan menjadi 1,4 triliun. Dan itu hanya

sebagian kecil dari potensi yang dihasilkan dari pengoperasian Terminal Batu Ampar. *Next*-nya, Pak.

Ini SPAM. Nah, ini sedikit unik, Pak, saya ingin menggambarkan bahwa kami itu masuknya sebagai tadi, sebagai katalisator, Pak. Dari sisi persiapan proyek sampai dengan konstruksi, setelah selesai baru kita jual ke platform yang namanya IWF. Sehingga, tapi dalam, dari masa persiapan sampai dengan konstruksi, kami sampaikan di sini, inilah BUMN-BUMN yang atau anak-anak usaha dari Danareksa yang terlibat dari penyiapan proyek dan diharapkan mereka mempertajam kompetensinya. Jadi, sebagai contoh persiapan proyek, sekarang itu kita minta Yodya untuk fokus kepada SDA, Pak, sumber daya air.

Dan ini kita punya mitra strategis yang membantu mereka juga untuk menyiapkan proyeknya. Jadi, kita bukan kita yang bisanya kita jago, *enggak*, kita minta mitra strategis kita untuk bersama-sama dengan Yodya menyiapkan proyeknya. Kemudian, konstruksinya sendiri akan dibangun oleh Nindya karya yang sudah *diimbangkan* selesai di restru di PPA dan sudah menjadi anggota dari Danareksa. Dan setelah proyeknya jadi, itu akan kita jual kepada investor. Jadi, kita *recycle* lagi, Pak, jadi dananya akan terus bergulir dan memastikan dengan berulangnya proyek ini, *core competencies* dari para member ini bisa *ter-develop*. Pertama itu.

Yang kedua, karena kita bergerak di air, *benefit*-nya buat masyarakat sangat tinggi. Karena kami sampaikan tadi, *sekarang aja* NRW-nya 41%, kalau ada proyek ini akan turun menjadi 5%, *coverage* airnya itu menjadi lebih dari, berapa? Lebih dari 80% kalau tidak salah. Dan IWF ini *Indonesia Water Fund*, Pak, namanya. Bukan, Pak.

Jadi, ini seperti kayak platform untuk investasi yang kami sediakan untuk investor di air, Pak. Jadi, tapi mereka tidak mau, biasanya mereka tidak mau mengambil *resiko* terkait dengan persiapan maupun konstruksi. Jadi, kami yang mengambil itu. Kenapa kami mengambil itu? Karena kita di dalam ekosistem kita *tuh* ada PJT 1, PJT 2. Kita punya konsultan karya, kita punya konstruksi, Pak.

Jadi, kita melakukan itu, kita *bundle project*-nya, sehingga setelah selesai baru kita sampaikan kepada investornya, kira-kira *gitu*. Itu, setelah itu dijual, kemudian kita *recycle* lagi dananya, seperti itu, Pak. Itu, apa namanya, ininya dan sekarang percontohan di Bandung, ini kita akan masuk ke dalam konsesi dengan PDAM Tirtawening selama 30 tahun, Pak. Jadi, setelah di *award* gitu *project*-nya, diberikan, apa, *di-award*, kemudian kita melakukan tadi konstruksi, kemudian baru kita *recycle* lagi, kira-kira *gitu*, Pak. Jadi, konsepnya adalah seperti itu. *Next*-nya.

Saya langsung saja ke KEK Merauke. Kemarin itu ada sedikit memberikan gambaran, Pak, bahwa ini yang sedang, terus terang ini sedang digodok di internal pemerintahan. Jadi, kita *disclaimer* bahwa ini bukan,

walaupun terbuka *tapi* ini adalah masih dalam, istilahnya masih dalam digodok di level *stakeholder* pemerintahan, Pak.

Jadi, yang akan dikerjakan dan diusulkan oleh, oleh Kementerian, istilahnya kita akan melakukan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, *on farm* maupun *off farm*, dengan besarnya sampai 650 ribu. *Piloting* yang akan dilakukan saat ini, kita sedang meminta pelepasan kawasan sebesar 60 ribu, Pak, 60.000 hektar, dan itu akan ditanami komoditas unggulan tebu dan padi.

*Again*, Pak, kita tidak akan berinvestasi, Danareksa tidak akan berinvestasi di *on farm* dan di *off farm*-nya, *tapi* kami diminta menyiapkan kawasan industrinya. Jadi, kami diminta menyiapkan kawasan industrinya, kami kenapa? Karena kami juga punya kawasan industri yang lain. Jadi, kita istilahnya kita *leveraging on our strength* untuk bisa membantu apa, pemerintah dalam penugasan ini.

**F-PDIP (DR. IR. HARRIS TURINO, S.H., M.SI., M.M):**

Izin, Pimpinan. Yang 500 hektar kemarin ini ya?

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Iya, Pak. Sebelah kanannya, Pak.

**F-PDIP (DR. IR. HARRIS TURINO, S.H., M.SI., M.M):**

Oh, terima kasih.

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Iya.

Jadi, yang 500 hektar ini sebetulnya bagian dari 2.500 kawasan industrinya, Pak. Nanti kawasan tebunya ada sekitar 48.000. Dan *next slide*-nya, Pak, *next slide*-nya ini. ini menggambarkan sebetulnya kerja bareng, Pak. Kerja bareng dengan seluruh BUMN yang terlibat. Jadi, di sini kami dengan bersama-sama Perhutani akan diminta membuat *setup* perusahaan baru.

Perusahaan baru ini yang menjadi operator kawasan industrinya. Mereka melakukan apa? Melakukan pembukaan lahan, Pak, walaupun sebesar 500 hektar dan 60.000. Tapi dananya akan dipakai untuk itu, untuk apa namanya, untuk investasi untuk pembukaan lahan dan BUMN yang terlibat itu sebelah kanan, Pak. Jadi, bahkan ada PLN juga di sini. Dan ini secara *real* sekarang sudah dili, sudah dilibatkan, dan bisa. Ya, Pak? *Nggak*, Pak. Jadi, yang kita siapkan *tuh* istilahnya kawasan industrinya, Pak. Jadi, di mana di atasnya itu akan nanti dibangun pabrik gula dan *bioethanol*. Dan itu bukan kami, bukan kami yang *ngerjain*, Pak, itu istilahnya kita siapkan untuk





investor, *either* dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri sebagai contoh sekarang ada PTPN. Jadi, *gitu*, Pak, nanti di *assign* mereka untuk menanam tebu di sana dan, dan mengolah hasil tebu itu dalam bentuk gula maupun dalam bentuk bioetanol, *gitu*.

Untuk infrastruktur dasarnya, Pak, untuk penyediaan listrik. Karena *kan* di sana belum, belum, apa, mungkin belum, sudah, semua masuk tapi belum cocok untuk kawasan industri. Itu sedang kita lakukan studi, Pak, terkait dengan hal itu.

Sebetulnya ininya, Pak, bisnis modalnya itu di halaman berikutnya. Izin, Pak, saya sampaikan, ini. Jadi, sedikit, Pak, nanti di *on farm*-nya itu akan ada tanaman yang akan ditanami itu adalah tebu dan padi dengan area hutan. Dari, dari *on farm*, tadi yang kalau *part-time project* itu, besar totalnya itu 60.000, yang bisa di-*plantable* itu ada 48.000. Itu akan masuk ke *off farm* berupa pabrik gula dan *bioethanol*.

Dan pertanian, tentunya ada penggilingan padi dan area hutan itu bisa dijadikan *woodchip*, dan itu di bawahnya, kami cuma di bawahnya, Pak. Kami hanya masuk bagaimana mendesain kawasan industrinya saja, kira-kira *gitu*.

Jadi, saya ingin meluruskan itu, jadi jangan sampai kita dianggap kita *expert* di bidang, di bidang kehutanan dan pangan. *Enggak*, Pak, kita hanya melakukan kawasan *aja*, hanya investasi di kawasan industrinya saja, kira-kira *gitu*.

Cukup, Pak, dari kami, ini penjelasan di halaman terakhir. Terima kasih kepada Pimpinan, saya kembalikan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Terima kasih kepada tamu undangan yang telah menyampaikan penjelasannya.

Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada para Anggota untuk memberikan tanggapan ataupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh para mitra, tamu undangan kita pada hari ini. Dari sayap kanan ada Pak Mufti Anam, ada Pak Sonny, ada Pak Haris dan Pak I Nyoman. Sebelah kiri, Pak Rudy Hartono Bangun dan Pak Muslim.

Selanjutnya, kami beri kesempatan Pak Mufti.

**F-PDIP (DR. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):**





*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama, tentu kami memberikan apresiasi kepada Pak Dirut semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Jujur ini spesial, Pak Darmawan, karena selama seminggu kami di sini, Pimpinan lengkap baru ada Bapak ini, artinya menyala betul PLN ini, Pak, ya.

Tentu kami sampaikan apresiasi, karena dari tahun ke tahun, kami lihat kali ini paparannya jauh lebih komprehensif daripada sebelumnya. Tentu ini sebuah langkah kemajuan, tapi tentu menjadi bagian dari kami sebagai DPR untuk memberikan masukan-masukan agar PMN ke depan hasilnya bisa jauh lebih optimal untuk rakyat begitu, Pak.

Nah, yang pertama Pak Dirut PLN, Pak. Jujur saya ini agak sedikit heran dengan PLN, karena ketika bicara elektrifikasi, selalu ujungnya adalah minta PMN. Kalau PLN itu mungkin perusahaan rugi, perusahaan *bongcos* begitu ya, mungkin bisa dimaklumi, *gitu*. Tapi PLN ini *kan* untung, bahkan akhir-akhir ini triliunan rupiah, bahkan 2024 apa 2023, 22 triliun begitu, Pak.

Nah, jadi bagaimana juga tidak untung, sudah PLN ini dimonopoli, kemudian harga bahan bakarnya juga diberikan harga spesial oleh negara. Gas saja, PLN dapat 6 MMBTU begitu, sedangkan yang lain, hari ini 9 dolar, begitu, Pak, ya *kan*. Belum lagi subsidi energi di tahun 2024 yang mencapai 73,6 triliun.

Jadi, bayangkan, begitu banyak *privilege* atau asupan yang diberikan oleh negara kepada PLN. Maka meskipun PLN ini, apa namanya, kalau bercandaannya orang, dikerjakan sambil leha-leha di, duduk-duduk di pantai *aja* ya mungkin masih tetap bisa hidup, tetap bisa *eksis* begitu, Pak.

Nah, maka mari kita coba berhitung dari paparan Pak Darmawan tadi, begitu. Di tahun 2025, Bapak mengajukan PMN 3 triliun untuk target listrik 85.017 pelanggan. Kalau kita bagi rata-rata dengan jumlah 3 triliun tadi, maka akan ketemu 35,3 juta per pelanggan untuk listrik 900 watt bagi masyarakat, begitu.

Nah, menurut kami ini sangat mahal, sangat boros sekali, begitu. Bahkan kalau saya coba-coba *search* itu, vendor banyak sekali yang menawarkan PLTS harganya hanya 13 juta, Pak. Nah, maka, dan itu pun 1.500 watt, begitu, Pak. Nah, maka ini selisihnya kalau saya cek ya, tiga kali ya, sehingga perlu adanya efisiensi ke depan, agar bagaimana listrik ini bisa jauh lebih murah begitu, Pak.

Nah, maka saya minta PLN ke depan bisa belajar kepada Pertamina. Nah, jika PLN ini ada program 100% elektrifikasi, Pak, Pertamina juga punya program BBM Satu Harga. Dan ini, program ini bukan program pemerintah loh, Pak, program murninya mereka. Bagaimana Pertamina saat itu harga



BBM di Papua 100.000, dia berpikir keras agar bagaimana harganya bisa sama dengan di Jawa. Caranya apa? Mereka memberikan subsidi. Dari mana? Dari kantong mereka sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian Pertamina ini jadi rugi? *Enggak*. Hari ini Pertamina untungya bahkan 70 triliun begitu, Pak. Nah, maka harapan kami ke depan, ya tentu bagi kami, Pertamina ya dipacu karena dia bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara kita. Kalau PLN ini *kan* bersaingnya dengan dirinya sendiri, begitu, Pak. Ukurannya adalah dirinya sendiri. Maka ya semanya sendiri, kalau di mata kami, begitu.

Maka, Pak Dirut, harapan kami ke depan, harus ada kontribusi PLN untuk mencapai 100% elektrifikasi. Masa *sih*, Pak Dirut ini *kan kita enggak* tahu ke depan, apakah empat bulan lagi Pak Dirut jadi menteri, *kan* kita enggak tahu. Maka harapan kami di waktu yang singkat ini harus ada *legacy* yang Pak Dirut ini bangun.

Caranya apa? Maka saya lihat tadi agak heran disini. Rasio elektrifikasi di paparan Bapak ini tidak tercapai di tahun 2024 dan mundur di tahun 2027. Terkesan menyalahkan pemerintah, karena tidak ada alokasi di tahun 2023-2024. Padahal kalau kita lihat, keuntungan Bapak banyak. Kalau Bapak serius, Bapak *pengen* membangun *legacy* di PLN, saya pikir *nih* apalagi kalau saya total tadi, hanya perlu 12,86 triliun. Untuk tahun 2026-2027 ini bisa Bapak tuntaskan juga di tahun ini, Pak, agar Bapak punya *legacy*.

*Sampeyan* tahu namanya Pak Jonan itu? Dia sudah bertahun-tahun yang lalu selesai jadi Dirut KAI tapi namanya sampai sekarang, kalau orang lihat KAI, pasti lihat Pak Jonan. Saya juga *pengen* punya cita-cita, *gimana* caranya kita ini lihat PLN ke depan, lihatnya Pak Darmawan, *kan gitu*, Pak. Apalagi sepulang haji siapa *tau* ini bisa terwujud begitu, Pak.

Nah, kemudian yang kedua, Pak. Hari-hari ini banyak sekali komentar dari masyarakat kita, terutama di Sumatera daratan, soal listrik yang mati berhari-hari, bahkan jarang ada pemberitahuan. Bahkan, mohon maaf, kalau izinkan *scroll* lebih dalam dari mereka, mereka merasakan bahwa *gimana* ya teman-teman di Jawa kok *gak* pernah merasakan listrik mati berhari-hari? *Kok* kita berhari-hari? Berminggu-minggu? Jadi, mereka merasa ada ketidakadilan dalam, apa namanya, menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat, begitu. Apa kita merdeka saja sendiri ya? Ada yang celetukan begitu, Pak, rakyat kita. Hati-hati. Maka harapan kami ke depan ini bisa dijaga. Bapak bisa belajar dari Pak Elon Musk itu sedang merancang untuk bagaimana ada *powerbank* listrik. Nah, maka harapan kami nanti ada *powerbank* raksasa yang diciptakan oleh PLN, apalagi ICBC itu *kan* sahamnya juga sebagian dimiliki oleh PLN. Manfaatkan *dong* mereka untuk riset, untuk kemudian menghadirkan, apa, *powerbank* raksasa agar kemudian ketika ada listrik mati dimana-mana itu kemudian bisa dihadirkan untuk, apa, mengatasi itu sementara.

Yang terakhir, Pak. Kami mendengar bahwa tarif PLN ini akan naik, begitu. Maka saya minta komitmen kepada Bapak, ketika 3 triliun ini diberikan kepada PLN, Pak. Apakah Bapak bisa menjamin bahwa, apa namanya, listrik

ini tarifnya tidak naik? Karena Bapak sudah spesial sekali *loh*, Pak. Elektrifikasi, Bapak minta PMN. Ini PLN, industrinya dimonopoli oleh Bapak. Lihat Pertamina, persaingannya banyak, Pak. Dia ada Shell, ada ini ada itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada PLN swasta, mungkin ya gulung tikar juga PLN ini, karena mereka bisa memberikan lebih murah dan sebagainya.

Belum lagi harga bahan bakar, batu bara, dan gas diberi murah terus. Bahkan ketika saat itu gas lagi mahal, tetap saja 6 MMBTU, sehingga belum lagi subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah ini, tahun ini saja 72 triliun. Sehingga kalau sampai listrik masih naik, berarti ya mohon maaf ya, memang Bapak ini tidak punya hati terhadap rakyat kita.

Bapak tahu, hari ini rakyat kita *nyari* makan *aja* susah, Pak. Banyak mereka yang di PHK dan sebagainya, yang kami tidak tahu, mereka mau menyampaikan keluhan-kesahnya, tidak berani, karena kemerdekaan mereka untuk bagaimana mengkritisi terhadap mandat yang sudah diberikan rakyat kepada pemerintah dikungkung, bahkan yang mereka kritisi *ditangkepin* oleh pemerintah.

Nah, harapan kami Bapak bisa hadir untuk bagaimana menjawab kegelisahan rakyat itu, agar setidaknya rakyat hari ini bisa fokus saja memikirkan mereka makan apa besok. Bukan memikirkan bagaimana mereka besok harus bayar listrik yang lebih mahal dari sebelumnya.

Itu saja dari kami. Yang lain-lain harapan kami, sekarang lagi marak namanya *predatory journal* begitu. Kami bukan ahli keuangan, *tapi* kami lihat Danareksa, kemudian DEFEND ID dan sebagainya. Harapan kami, Bapak tidak menutup-nutupi soal pembukuan keuangan, Pak, karena Bapak secantik-cantiknya Bapak mengemas laporan keuangan Bapak, akan jadi bom waktu di berikutnya, yang sejarah akan mencatat terhadap rekam jejak yang Bapak lakukan hari ini.

Itu saja dari kami. *Maturnuwun*.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

*Walaikumsalam,*

Pak Rudi Hartono Bangun.

**F-P NASDEM (RUDI HARTONO BANGUN):**

Siap, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera bagi kita semua,



**Yang saya hormati Pimpinan, dan  
Seluruh rekan Anggota,  
Yang saya hormati Dirut PLN,  
Dirut Danareksa, dan  
Dirut LEN,**

Pertama, Bapak, ini saya ingin memberikan masukan atau penjelasan dari Pak Dirut PLN terkait rapat kita FGD tadi malam. Pertama, saya ingin memberi masukan begini, Pak, dari yang Bapak sampaikan paparan A sampai Z tadi, Bapak sampaikan bahwasanya selama ini banyak memakai dana internal ya, Pak? Untuk Lides ini, listrik desa, *gitu*. Dan juga pinjaman, *loan* ya, Pak? Untuk juga jaringan-jaringan dan Lides. Karena ya kalau saya lihat begini *nih*, Pak, karena memang wajar karena memang saya lihat laba bersih PLN juga makin tahun makin meningkat, Pak.

Ini saya lihat tadi malam juga di angka 22,1 triliun laba bersih PLN. Dengan kondisi yang seperti ini, Pak, laba makin besar, ya saya pikir ya sudah wajar Bapak memakai dana cadangan, dana internal. Jadi, tidak berharap terus sama PMN, seperti Bapak ajukan 2023 yang juga tidak terkabul. *Kan gitu*, Pak Darmo? 2023 apa 2022 yang tidak jadi 10T yang Bapak ajukan.

Dan saya lihat, Bapak *kan* pasti sudah paham ini tentang *mensiasati* pendapatan. Laba-labanya untuk dialokasikan tadi, Pak, ke pembangunan *project-project* jaringan Lides ini, *gitu*. Jadi, saya secara logika memang masih masuk akal mendukung langkah-langkah jajaran PLN ini, Pak. Karena memang Lides ini dibuat di penjuru desa di Indonesia.

Jadi, memang ya seperti saya sampaikan tadi malam, kalau kita ini sore berangkat naik pesawat, Pak, menuju mana pun, kita lihat alur lampu-lampu itu panjang jaringannya, *gitu*, sampai mendarat, artinya ada pihak-pihak yang bekerja untuk membuat penerangan itu salah satunya bekerja itu adalah orang Bapak di daerah, *gitu*.

Dan dalam hal ini, Pak, ini *kan* PLN mengajukan PMN, Pak. Untuk 2025 ini, 3 triliun ya, Pak? Dan ya memang wajar saja, Pak, PLN meminta anggaran PMN ini, karena sudah jelas PMN ini Bapak pakai lagi untuk jaringan yang dipakai masyarakat *kan*, Pak, *gitu*? Jadi, itulah, seperti itu.

Jadi, saya lihat ya, selain Bapak pakai dana internal, juga hari ini mencoba untuk meminta PMN dari anggaran rakyat, tapi Bapak kembalikan untuk jaringan listrik rakyat. Itu saya ya masih logika, Pak. Pak Haji, Pak Haji ya, katanya.

Tapi, satu lagi yang terakhir, Pak, ini yang ketiga ini. Saya juga ingin minta detail penjelasan, Pak, dari yang 49,8 triliun ini, Pak. *Kan* ada yang Bapak pakai PMN yang telah di serap, yang telah dinikmati selama ini, dari

mulai 2015, 16, PMN-nya, Pak, ya. 2019, 2020, 2021 dan 22. Jadi, total 49,8 triliun yang sudah dipakai selama ini, sebelum Bapak dan sesudah, *gitu*.

Nah, yang ingin saya minta keyakinan sedikit, Pak. Saya atau teman-teman ya, belum pernah melihat ini, Bapak tunjukkan ini *real*-nya di mana saja, fisik proyek Lisdas ini yang sudah terbangun, *gitu*. *Kan* ini masih gambar-gambar, Pak. Masih gambar-gambar *kan*, tapi kayaknya kita selama kunjungan kerja ataupun reses ini *kayaknya* belum pernah ya, Pak, ditunjukkan ke desa yang terpencil. Bapak bilang tadi di Nias, di Bila Sumatra, di Papua, di mana lagi, itu belum, Pak. Ini yang mohon diyakinkan saya dan teman-teman. Itu Pak, Pak Haji Darmo, Dirut PLN yang mengajukan PMN hari ini.

Berikutnya, ini Pak Danareksa, Pak Haji Yadi atau, Pak Yadi *udah* Haji belum? Belum ya, Pak? Oh, belum. Pak Yadi, Ini saya, kita baca ini, Pak, *kan* dari paparan Bapak ini Danareksa mengajukan 2 triliun ya, Pak, ya? Di 2025 ke depan. Jadi, sudah Bapak jelaskan, tadi fungsinya Bapak ini katalisator, Pak. Katalisator apa itu, Pak? Artinya *gitu*.

Jadi *gini*, Pak, ya kalau katalisator itu bahasa ekonominya, sesuatu yang memicu perubahan drastis. Nah itu, Pak, jadi hebat ini bahasanya, katalisator. Jadi, yang saya baca, Pak, dari paparan, dari detail ini, Bapak membiayai beberapa pembangunan fisik seperti *Port* Batu Ampar yang kemarin kita lihat, kita saksikan di Batam, Pak. Jadi, fungsinya itu untuk pelabuhan peti kemas, *gitu*, Pak. Cita-citanya, Pak, menggantikan *Port* Singapura, *gitu* ya, Pak? Kemarin *kan*? Iya, jadi memang di situ *kan* dekat Singapura, Pak Yadi. Harus yakin, Pak Yadi.

Dan yang kedua, Pak, ada juga *nih* Bapak sampaikan *kan* untuk KEK ini, Pak. Yang tadi dipaparkan untuk KEK di Indonesia Timur. Dari paparan ini sebenarnya logika juga, Pak. Indonesia Timur ini *kan* daerah yang selama ini kurang terjamah, di situ akan dibuat *project* ketahanan pangan, akan dilibatkan, Bapak bilang tadi, PTPN, untuk membuka kebun gula, tebu, *gitu kan*, Pak? Dan akan dibuat pabriknya, *gitu*.

Jadi, ya memang ini berdampak ekonomi terhadap rakyat sekitar, Pak. Dan ini *kan* Bapak buat akan di Merauke *nih* pembiayaannya dan bisa menyerap 9.000 bisa, Pak? 9.000 tenaga kerja? Bisa, Pak Yadi? Bisa ya. Nah, itu karena harus diyakinkan, Pak Yadi. Karena ini *kan* dana PMN, negara, *ujungan* negara ini dalam kurung rakyat juga, Pak.

Kemudian, Batu Ampar. Saya ingin keyakinan Pak Yadi, benar tidak bisa menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja, Pak? Dan satu lagi yang di Jateng, Pak, yang kawasan industri. KIW ini Wijaya Kesuma ya, Pak? Nah, ini *kan* lebih besar lagi penyerapan tenaga kerja ini, 19 ribu sampai 20 ribu, Pak, yang akan diserap dan berdampak kepada masyarakat Jawa Tengah. Ini daerahnya Pak Pimpinan ini.

Nah, ini saya ingin keyakinan Pak Yadi dan saya juga yakin, mungkin teman-teman bisa yakin, Pak, *gitu*. Nah, itu, Pak Yadi, karena itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan permohonan Danareksa PMN 2 triliun.

Saya pikir itu dulu, Pimpinan, saya kembalikan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Kawan-kawan, mohon izin.

Ini Direktur Utama PT PLN mau pamit, yang nanti mau digantikan oleh Pak Hartanto, Direktur Bisnis. Tapi sebelumnya, silakan menjawab dua penanya dari anggota. Kemudian, yang *pengen* menanyakan langsung ke Dirut langsung diinterupsi saja, nanti pas menjawab ya.

Langsung ya, ke Dirut. Langsung? Silakan yang ke PLN dulu.

**F-PDIP (SONNY TRI DANAPARAMITA):**

Ya, langsung. Saya cuma pertanyaan PLN.

*Makasih.*

**Yang saya hormati Pimpinan dan,  
Yang saya hormati para Direksi,**

Saya kebetulan juga enggak *nanya* ke yang lain. Kemarin sudah pendalaman panjang. Yang belum terjawab dari Dirut utama itu mulai kemarin pantun, tadi juga pantun *gitu*, makanya saya awali dengan pantun.

Maksud hati mau berkantor di IKN  
Tapi gagal karena belum ada air  
Saya ingatkan kepada PLN  
Agar bijak menggunakan jika PMN-nya cair

**WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA  
KOMISI VI DPR RI):**

*Cakep.*

**F-PDIP (SONNY TRI DANAPARAMITA):**

Langsung saja, ini target PMN Lisdas 2025 3 triliun, totalnya ada 192 desa. Tadi sudah ada foto, ada gambar saya *enggak* tahu itu nanti apakah semuanya. Dulu janji 2024, tapi ini janji lagi 2027, begitu ya, Pak Dirut, ya?



Karena Haji, janji adalah uang, Pak. Iya kan, benar *kan*, Pak? Janji adalah uang. Uang atau utang, Pak? Utang? Saya hilangkan 1T saja, Bapak sudah protes, nanti kalau Bapak hilangkan 3 triliun ini, saya yang ganti protes, Pak. Pembiayaan 3 triliun, untuk tadi sudah teman saya itu sampaikan 192 desa, 85.017 pelanggan. Kalau di *breakdown* 35 juta per pelanggan. Saya kira *ngitungnya* juga memang tidak seperti itu, kalau menurut saya.

Saya belajar kasus dari, *enggak* usah jauh-jauh, saya bersyukur Merak sudah dibangun di Situbondo. Di Dapil saya di Banyuwangi ada 7 dusun sampai sekarang itu tidak terlistriki oleh PLN. Nah, pembiayaan sebesar 3 triliun itu apakah misalkan termasuk biaya penggunaan, misalkan kalau di kawasan hutan?

Jangan sampai nanti alasan gagal lagi karena 3 triliun itu hanya untuk pembangunan jaringan listrik beserta konstruksinya saja. Sementara yang kita tahu, daerah-daerah wilayah masyarakat yang belum teraliri PLN itu biasanya jauh dari perkotaan. Melintasi hutan, melintasi kawasan-kawasan yang bukan milik PLN, sehingga itu perlu biaya-biaya tambahan.

Saya tidak tahu, 7, hanya contoh kasus 7 dusun di tempat saya itu. Jadi, di Sumbernanas, ada di Pancer, di Baung dan sebagainya, dan saya langsung ke sana. Itu perkembangannya seperti apa? Jangan sampai nanti gagal lagi 2027, karena untuk riset *enggak* ada biayanya, Pak, karena tidak termasuk yang 3 triliun itu.

Nah, saya kira nanti walaupun Pak Dirut keluar, bisa menjelaskan soal ini. Saya membayangkan, kalau luar Jawa, pasti dananya bisa lebih dari itu, karena satu contoh saja di Baung itu, untuk *narik* 200 pelanggan, 200 KK itu butuh 10 km panjang kabelnya. Belum lagi biaya untuk *motong* ranting, *motong* pohon yang itu izinnya lewat KLH, tidak mudah.

Saya sebagai perwakilan dari sana, berupaya mendorong itu dengan Forpimda, dengan Sekda, juga sudah. Karena itu milik Perhutani, lewat Perhutani, lewat KLH. Nah, ini yang *kan* belum diceritakan. Tadi malam, kemarin waktu pendalaman, Pak Pimpinan, kebetulan Mas Bimo menyampaikan, ini penting disampaikan besok, gambar-gambar tadi lebih detail. Kalau *enggak* salah tadi malam begitu *kan*? Tapi ini saya *kan* baru *slide-slide* saja. Ini contoh kecil, kalau ke depan kita *nggak* diceritain soal itu, jangan lagi digunakan untuk alasan kami gagal lagi di 2027. Sekali lagi, janji adalah uang, Pak. Jadi, saya berharap begitu.

Yang kedua soal, yang lain-lain soal kesejahteraan. Saya senang sebagai pelanggan PLN, ada PLN *Mobile kayak gitu*, kita lebih cepat. Tapi kadang ada kendala, Pak. Usut punya usut kendalanya apa? Yang mengerjakan itu, pihak ketiganya, itu kesejahteraannya kurang diperhatikan. Jadi, mereka butuh kalau satu titik itu, cari titik yang lain agar biaya *transport-nya* murah. Itu yang pernah saya alami, karena terlalu kecil. Jadi, kalau soal tadi, apa namanya, belum disampaikan soal itu, mohon itu juga butuh penjelasan.





Berikutnya lagi soal meteran meskipun sebagian baru, tapi saya yakin di beberapa pelosok banyak yang masih lama. Saya *kok* kayaknya belum pernah melihat ada tera ulang lagi terhadap meteran-meteran itu. Itu kan sangat berbahaya. Saya harap itu juga menjadi fokus dari PLN agar tidak terjadi kebakaran dan hal-hal lain yang tidak kita inginkan bersama.

Saya rasa itu. Dan sebagai penutup saya bikin pantun, ya.

Meminta ibukota janganlah prematur  
Apalagi jika motifnya ego semata  
Terima kasih buat seluruh Direktur  
Atas dedikasinya mengabdikan pada negara tercinta

*Makasih.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Sebelum ke penanya atau pendalam yang lain, kami persilakan Pak Dirut untuk menjawab. Terutama yang tadi, kenapa harus menggunakan dana PMN untuk elektrisasi desa? Bukannya PLN *kan* banyak duit?

Silakan jawab.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Pimpinan, sedikit sebelah kiri, Pimpinan. Pak Bimo.

Karena Pak Dirut mau jalan, saya tambah sedikit *aja*, Pimpinan, berkaitan PLN *aja*, *enggak* ada yang lain.

Terima kasih.

**Pimpinan,  
Bapak Dirut PLN,  
Danareksa, dan juga  
PT LEN,**

Pak Haji Darmo, selamat yang baru pulang dari haji, Pak. Pertama, saya tambah sedikit PLN, Pak. Kita lihat hari ini bahwa kalau kita mengacu kepada target pemerintah itu jelas, Pak. Tahun 2024 rasio elektrifikasi rumah tangga yang mencapai 100%. Kita bersyukur, Pak, artinya bahwa target yang diharapkan memang sampai hari ini memang belum tercapai ya, Pak Darmo, ya.

Yang kedua, tentu saya berharap yang disampaikan Pak Sonny tadi, memang ini harus ada pola, Pak, oleh PLN, berkaitan dengan, kalau desa



100% *Insha Allah* ada telepon *nih*, Pak. Hari ini mekanisme dusun *nih*, Pak. Ini sama, Pak, kejadian kita di Aceh juga sama. Ini banyak sekali dusun-dusun belum tersentuh *nih*, para Pak Ketua. Jadi, saya berharap nanti, ketika konsep ini saya berharap siapa yang mendata ini, Pak? Kalau dibiarkan pendataan ini tidak didata oleh PLN, saya yakin ini *enggak* akan pernah selesai.

Dusun. Jadi, *kan* ada desa, ada dusun. Jadi, banyak sekali dusun-dusun ini belum tersentuh, Pak. Ini kemudian catatan buat Pak Darmo. Silakan, mekanisme seperti apa? Jadi, sehingga target 100% betul-betul terpenuhi, Pak.

Yang kedua, tentu menyangkut harga. Kita berharap hari demi hari PLN jangan terus naik, Pak. Justru semakin *supply* energi kita itu makin bagus, justru beban masyarakat harus berkurang, bukan kita naikkan, Pak. Memang industri oke, tapi ketika masyarakat terasa, Pak, hari ini, ya *kan*. Di satu sisi kita bersyukur, Pak, PLN dengan sistem digital kita mudah. Mudah, kadang-kadang kita mau *ngisi* token, segala macam, sangat mudah. Artinya itu satu hal yang luar biasa.

Yang terakhir, Pak, ini tentu berkaitan dengan daerah terpencil, Pak. Saya melihat data di sini, bahwa sampai akhir Desember itu ada sekitar 140 desa, Pak, belum teraliri listrik. Ini terutama di Papua, Pak:

- Ada 12 desa di Papua Barat Daya;
- 9 desa di Papua;
- 56 desa di Papua Pegunungan; kemudian
- 40 desa di Papua Tengah; dan
- 60 desa di Papua Selatan.

Tentu, kita berharap ini juga menjadi catatan, Pak. Kita harap dengan target pemerintah untuk menyelesaikan Lides ini, kita harapkan, ini desa, Pak, belum lagi dusun. Makanya saya berharap ini betul-betul dimaksimalkan. Jadi, sehingga PLN hari demi hari *clear*, Pak. Walaupun saya jujur hampir 100%, Pak. Tapi, desa-desa ini menjadi prioritas, Pak, sehingga target PLN ini kita harapkan di tahun berikutnya tidak lagi bergantung ke PMN, Pak. Jadi, sehingga hari demi hari bisa dipenuhi oleh sendirinya, Pak.

Saya pikir itu, Pimpinan, karena Pak Dirut sudah mau jalan. Ini jadikan catatan buat saya supaya bisa lebih maksimum berkaitan data-data itu, Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Iya.

Pak Muslim, yang lainnya nanti ditambahkan setelah respons dari Pak Dirut. Silakan.



**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas saran, bimbingan dari Komisi VI. Memang pembangunan Lisdes ini berbeda dengan investasi ketenagalistrikan di non-3T. Jadi, tadi kami sudah memaparkan bahwa rata-rata biaya penyambungan per rumah daerah non 3T itu 2,5 juta per pelanggan dan untuk yang 3T ini memang jauh lebih mahal. Jawa-Bali lebih murah, yaitu sekitar 18,5 juta per pelanggan, Sumatera-Kalimantan 38,7 juta *average*, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara 35,3. Dan ini kami harus mengakui bahwa begitu kami menysar di lapangan, kami harus menarik jaringan transmisi tegangan menengah dalam jarak yang sangat panjang, diteruskan juga dengan gardu distribusi. Kemudian, ditambah lagi dengan jaringan tegangan rendah yang cukup panjang tetapi hanya beberapa rumah yang harus kami sambung untuk dusun-dusun itu.

Nah, untuk itu kami sudah memetakan secara spasial digital yang dilakukan setiap GM masing-masing. Kemudian, kami sudah panggil semua GM itu ke Jakarta dan ada tes peta buta, Pak, dari setiap GM tersebut. Desanya berapa, dusunnya berapa, tunjukkan petanya.

Kemudian, kami juga memetakan *existing* infrastruktur. Infrastruktur yang sudah ada dan bagaimana cara *nyambung*nya. Kemudian, secara digital kami turunkan RAB-nya, Rencana Anggaran Belanja. Jadi, dari data itu kami kemudian kompilasi seluruh desa, seluruh dusun dan menjadi satu buku panduan listrik desa sampai mencapai 100%. Dan dana yang dibutuhkan, Pak Adi, berapa totalnya? 22,08 triliun untuk mencapai 100%, Bapak, termasuk dusun. Jadi, ini kami petakan semuanya, 22,8 triliun, Bapak, sampai jaringan tegangan rendah, Bapak. Untuk sampai itu.

Nah, untuk itu kami sendiri kemudian berkomunikasi dengan *stakeholders*. Setiap GM kami tugaskan paparan ke gubernur, kemudian juga para bupati, walikota terkait. Dan untuk itu kami juga siap apabila dibuatkan suatu FGD dari masing-masing provinsi, begitu, yang kemudian kami paparkan seperti apa pemetaannya dan bagaimana cara *nyambung*nya.

Nah, memang kami akan memasang PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), hanya apabila tidak mungkin lagi membangun jaringan ke lokasi tersebut. Karena apabila menggunakan PLTS, ya memang listriknya menyala, tetapi hanya dari jam 10.00 sampai jam 2.00 siang saja dan sisanya masih hidup dalam kegelapan.

Dan kami sudah mencoba dengan baterai, ternyata begitu kami memasang baterai dan kami juga studi banding, baik itu ke Australia maupun ke Singapura, ada namanya *D rating*. Jadi, setiap tahun baterai itu berkurang sekitar 4% dan dalam enam tahun baterainya harus diganti dengan yang baru. Maka, dampaknya adalah harga per KWH-nya itu juga tidak murah.



Jadi, masih sekitar 18 sen per KWH untuk penyimpanan dari baterai tersebut, kalau kita mengacu pada harga yang ada di Singapura dan lain-lain.

Sehingga, kami sendiri berusaha untuk menyambung jaringan kami ke daerah-daerah yang terpencil tersebut dan kami sudah petakan semuanya sampai saat ini, sehingga melihat itu, kami tentu saja ingin mengalokasikan sebanyak mungkin dana kami. Sehingga kalau melihat 2023, walaupun tidak ada PMN, kami tetap memasukkan alokasi 4 koma sekian triliun dan tahun ini sekitar 1,4 triliun. Tetapi juga, kami ini mempunyai utang yang cukup besar yang sekitar 400 sekian triliun yang kami sudah berusaha menurunkan, karena dalam menakar kesehatan keuangan dari perusahaan itu ada namanya *Debt to EBITDA Ratio*.

Nah, *Debt to EBITDA Ratio* itu, kalau di atas 5 itu perusahaannya sudah sakit. Dan 5 tahun lalu, *Debt to EBITDA Ratio* kami itu 5,9, Bapak. Sehingga kami berusaha menurunkan, yaitu bagaimana *debt* kami, hutang kami turunkan. EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization*) kami naikkan dan untuk itu kami berhasil menurunkan sudah di bawah 4 saat ini, jadi perusahaan itu. Tetapi apabila ini kami masukkan kembali dengan *debt* di mana memang bagaimana pengembalian ...

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Jadi, kalau tanpa PMN, *transmission* sampai tegangan rendah tadi dibiayai PLN akan cenderung *debt*-nya naik lagi?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

*Debt*-nya akan naik kembali, Bapak. Jadi, *financial ratio* kami juga akan terkompromikan begitu, Pak. Jadi, kondisi keuangan kami akan menjadi melemah, Bapak. Jadi, kami sendiri tentu saja mem-*balance* kemampuan finansial kami, kemudian juga *rate of return* dari *project* kami, Pak.

Jadi, kalau *cost of fund* kami itu 8%, Pak, 7%, 8%, 9%. Mungkin kalau perusahaan yang lain bisa sampai 9,5-10%. Tapi, *rate of return* dari *project* ini hanya sekitar 1%, Bapak, artinya bayar utangnya kami dengan bunganya itu tidak akan menutup kalau menggunakan dana dari pinjaman. Dan untuk itu kami menggunakan dana dari pinjaman, sehingga tadi dari hitung-hitungan kami, setiap 3 triliun, Bapak, yang kami pinjam untuk PMN, untuk Lisdes ini menggantikan PMN, kami bayar bunganya 1,55 triliun.

Jadi, bayar totalnya itu ke pinjamannya itu adalah totalnya 3 triliun ditambah 1,55 triliun bunganya, menjadi 4,5 triliun, apabila ini pinjaman ini nanti sudah sampai lunas, Bapak. Nah, ditambah juga ...

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Maaf, Pak. Kemarin pinjam berapa, Pak, yang *gak* cair 2022-2023 itu pinjam berapa dan dari mana?



**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Dari berbagai sumber, Ibu. Jadi, kami ada *global bond*, ada berbagai sumber. Jadi, pendanaan kami dari berbagai sumber, baik itu *global financing*, ya.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

*Short* itu?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

*Long*, Bapak.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

*Long*.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Kami punya pendanaan yang cukup kuat, Bapak, baik itu dari *global bond*, dari dunia internasional, di mana *cost of fund* kami masih dikelola dengan baik, sekitar 6-7%. Tadi hutang kami total, kami *tuh* sudah turun dari 450 sekian triliun menjadi 396 triliun, selama 4 tahun, Ibu. Jadi, kami sudah menurunkan sekitar 50 sekian triliun selama 4 tahun ini.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Boleh nanti di kita diberi informasi rincian *global bond* tadi sama sumber lainnya, Pak. Dari mana dan untuk apa saja.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap, Ibu.

Jadi, dalam hal ini, Bapak, tentu saja kami mengapresiasi dukungan dari Komisi VI, bahwa untuk agar program listrik desa ini bisa *sustainable* dan sudah bisa mencapai 100%, tentu saja kami terima kasih atas dukungan apabila PMN 3 triliun ini bisa didukung dari Komisi VI.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

*Dikit* penasaran, Pak, 450 triliun itu pinjaman tahun berapa?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**



Total, Ibu.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Total dari?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Selama akumulasi, Ibu.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

2000 berapa?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Dari selama PLN berdiri, Bu

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Dari 2022 dan waktu 2022 dan 2023 ketika PMN tidak cair, pinjam juga *enggak?*

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Kami pinjam untuk yang tadi 4,7 dan 1,47 itu kami.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Dari?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Dari berbagai sumber, Ibu.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Nanti sumbernya, Pak, ya.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Iya siap, Bu. Kami akan laporkan secara lengkap, Bu, sumber-sumber pinjaman PLN. Jadi.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Teman-teman dan Pak Dirut, nanti akan dilanjutkan sama Pak Direktur Bisnis. Silakan yang untuk Pak Dirut cukup? Ya *udah*.



Silakan, Pak Dirut, ganti dengan Pak Direktur Bisnis.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Kami digantikan dengan Direktur Distribusi, Pak Adi.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Oke, Pak Adi untuk menggantikan Pak Dirut.

Selanjutnya. Pak Muslim, ada tambahan? Siap-siap, Pak Harris Turino.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

PLN, sementara cukup. Saya ingin tambah berkaitan dengan PT LEN *nih*, Pak. Kemudian saya melihat hari ini, terima kasih Pak Dirut PT LEN, Pak Bobby dan jajarannya. Ini Dirut PT PAL hadir *enggak* di sini? Siap, terima kasih PT PAL. Kemudian, dari PT DI hadir? Dari Pindad? Oh, ini Pindad, saya WA *gak* pernah dibalas sekalipun *tuh*, coba dicek, Pak, itu.

Oke, terima kasih. Yang pertama tentu berkaitan dengan PT LEN, Pak. Pertama, tentu yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas produksi dan kapabilitas dalam bidang *unmanned* ya, Pak, ya? Sistem, ya? Sebesar 350 miliar, untuk PT PAL 200 miliar, kemudian, PT DI 1 triliun, dan juga PT Pindad 450.

Kemudian, kita melihat bahwa manfaat daripada PMN. Saya setuju, Pak, khusus misalnya berkaitan PT PAL, contohnya. PT PAL memang menurut saya ini cukup penting, Pimpinan, apalagi kita lihat dua per tiga wilayah Indonesia ini laut *nih*, Pak Dirut. Jadi, artinya segala sesuatu berkaitan dengan fasilitas *tuh* harus betul-betul maksimum. Apalagi kita sudah banyak produksi kapal-kapal kita di dalam negeri dan juga mungkin dari luar negeri. Kalau kita lihat dukungan hanya 200 miliar ini, saya yakin PT PAL juga kita harapkan bisa lebih, Pak. Kenapa? Karena ini peran PT PAL sangat strategis, Pak, ke depan. Apalagi dengan presiden baru, saya lihat yang berpihak kepada industri pertahanan, Pak.

Yang kedua, Pindad, saya yakin. Pindad ini, saya berharap, Pak, kenapa saya bilang? Kita tahu betul hari ini *kan* kita tidak bisa *pungkiri*, Pak, bahwa sebagian besar khususnya kebutuhan senjata kita, hampir semuanya impor, sebagian besar. Kita berharap paling *enggak* biarpun Pindad hari ini kan banyak sekali senjata dipakai khususnya kan oleh TNI, kita buatan Pindad, Pak. Kita berharap sejauh mana Pindad ini tidak, paling *enggak*, sekian persen bisa diproduksi dalam negeri. Saya ingin dapatkan data, Pak, dari seluruh persenjataan yang kita miliki hari ini, itu berapa persen yang diproduksi oleh Pindad dan berapa persen kita impor? Termasuk jenis-





jenisnya, Pak, termasuk pelurunya dan segala macam. Kalau AK47 bukan buatan Pindad, Pak? Bukan, ya? Artinya apa? Bahwa ketika pasaran ini besar, saya yakin Pindad harus mengambil peran di sini. Jadi, sehingga kita tidak harus dari luar, Pak. Karena saya yakin kalau kita fokus dengan produksi-produksi Pindad, saya yakin Pindad cukup ada yang ekspor juga kan? Pada kebutuhan dan lebih begitu.

Kemudian, yang produksi drone ini, Pak, dari mana, Pak? Perusahaan mana? Dari Pindad juga, bukan?

**DIREKTUR UTAMA PT LEN INDUSTRI (BOBBY RASYIDIN):**

Dari Len dan DI, Pak.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Oh. Iya, saya berharap drone ini juga harus diambil peran, Pak. Kita tahu betul hari ini berapa banyak drone beredar di pasar. Itu rata-rata produk India dan China, Pak. Dan kebutuhan drone di masyarakat ini *kan* cukup besar, Pak Aris. Saya pikir *nih* dari teman-teman LEN ini harus melihat, Pak, pasarnya, Pak.

Jadi, sehingga untuk memenuhi pasar ini apalagi hari ini drone kan sudah digunakan untuk sektor pertanian dan lain-lain. Kalau ini bisa punya peran strategis daripada LEN ini, saya yakin, kita bukan hanya dari PMN, Pak, itu pasti investasi begitu besar, Pak. Karena kebutuhan kita begitu besar, Pak, apalagi di sektor pertanian. Kalau perang *kan* kita *enggak* ada perang hari ini. Saya berharap nanti kalau berkaitan perang ini, kita lihat mana-mana yang hari ini yang sangat dibutuhkan *aja*, Pak. Kalau tidak dibutuhkan, mungkin kita lebih mengarah ke sektor-sektor lain yang bisa diambil oleh LEN itu sendiri.

Kemudian, yang lain berikutnya menyangkut Danareksa ini. Terima kasih, Pak Yadi, ya. Kita kemarin bareng-bareng kalau *enggak* salah ke Batam, Pak, ya. Saya melihat terus-terang, Pak Yadi, selama ini terus-terang kita peran Danareksa di BP Batam *nih kan enggak* begitu muncul selama ini. Jadi, begitu kita kemarin turun, ternyata luar biasa peran Danareksa di sana, Pak. Artinya bahwa dengan investasi begitu besar di Batam yang dilakukan oleh BP Batam dan di-*support* oleh Danareksa, saya pikir ini sinergitas harus dibangun dengan kuat, Pak. Kenapa saya harapkan? Karena antara Batam dan Singapura ini *kan* memang sangat dekat, Pak. Artinya apa? Kalau semua investasi di Batam, saya yakin terbesar kan Singapura, Pak. Saya khawatir suatu saat Batam milik Singapura, Pak. Kenapa? Semua lini investasi terbesar Singapura. Ini juga harus dipikirkan, Pak. Jadi, sehingga peran Danareksa ini dalam rangka pengembangan kawasan-kawasan termasuk pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar, Pak. Kita berharap itu juga memang masih jauh dari harapan yang kita lihat, Pak, kemarin dibandingkan dari beberapa tetangga kita, ya. Saya berharap ini dengan pengembangan Batam hari ini, investasi setahun hampir 36 triliun,

*tapi* dengan peran Danareksa dengan pengembangan berapa kawasan, saya yakin ini juga harus dilihat, Pak. Jangan sampai kita suruh sendiri, Singapura terus, Pak. Walaupun, boleh dilihat *lah*, saya lihat hampir terbesar *kan* Singapura, betul *enggak*? Investasi *kan*. Ini juga harus kita lihat nasionalisme juga, Pak, sini.

Saya khawatir suatu saat *nih* kawasan Batam ini, kalau semua di dominasi Singapura lama-lama kita digusur, Pak, di situ. Ini penting buat saya. Jangan kita bicara nanti, bicara hari ini kita tahu betul mana strategi bisnis-bisnis yang kita kembangkan, sehingga dampak kepentingan, khususnya kepentingan kita jauh lebih beruntung, bukan hanya kepentingan Singapura. Karena terus-terang, hari ini *kan* wisata terbesar di Indonesia setelah Bali. Batam, Pak, khususnya Kepri.

Artinya apa? *Kan* paling enak dia bawa dolar, dia belanja rupiah. Jadi, paling mudah, jadi Batam *special* di Singapura untuk kepentingan mereka. Jadi, kita harapkan kepentingan kita juga harus kita maksimalkan, Pak Dirut, di situ. Termasuk juga pembangunan kawasan-kawasan lainnya.

Saya pikir itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

*Walaikumsalam,*

Kemudian, Pak Harris Turino.

Pak Nyoman dulu.

**F-PDIP (I NYOMAN PARTA):**

Ini tenggorokannya sakit karena dari tiga hari *ngomong* terus, Pak Harris.

**Pimpinan, beserta  
Seluruh Anggota Dewan,  
Bapak/Ibu Dirut yang saya hormati,**

Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kepada PLN. Sejarah penerimaan PMN dari PLN ini dari 2015 sampai 2000, rencana 2025. 2015; 5 triliun, 2016; 23,56 triliun, 2019; 6,5 triliun, 2020; 5 triliun, 2021; 5 triliun, 2022; 5 triliun, dan sekarang diusulkan 3 triliun.

Pak Dirut, Pak Adi, sesungguhnya PLN punya tidak rencana proses Lisdes ini selesai? Karena *kok* bisa berubah dari rencana 2024? Kalau 2024



tidak terbiayai, harusnya 2025. Tapi kenapa akhirnya lompat langsung ke 2027 itu. Jadi menurut saya kelamaan. Ketika kita di daerah Jawa-Bali menikmati listrik, sementara masih banyak saudara kita di pinggiran-pinggiran Indonesia masih belum menikmati listrik. Jadi, Indonesiasentris ini belum terwujud, khususnya dari persoalan listrik desa. Coba disebutkan lebih konkret lagi, sampai jika misalnya di target 2025 atau 2000, jika 3 triliun ini disetujui dan rencana 2026 kalau selesai itu berapa *sih*? Tolong, *kan* tadi sudah ada dirinci, di daerah terpencil harga sekian, harga sekian, tolong dibuat lebih rinci.

Yang kedua, saya melihat PLN juga belum bisa melakukan antisipasi di luar urusan listrik desa yang belum 100% terhadap daerah-daerah pengembangan baru, daerah kepulauan yang berkembang pesat pembangunannya. Jadi, saya ingin menyampaikan di Bali, di Pulau Nusa Penida, ada tiga pulau, Pulau Nusa Gede, Pulau Ceningan, dan Pulau Lembongan. Itu beberapa kali listriknya harus mati sampai 4 jam, Pak. Kendalanya karena persoalan pembangunan yang pesat di sana untuk akomodasi pariwisata, tetapi PLN *enggak* bisa mengikuti. Dan secara kebetulan karena dia di kepulauan, harganya lebih mahal. Oleh karena itu, tolong ini diusahakan, karena pasti daerah itu akan berkembang pesat, agar tidak ada kendala. Apalagi seperti di Sumatera listriknya mati berhari, satu hari akan merugikan banyak pihak.

Terus selanjutnya, sekali lagi untuk PLN. Saya tadi sebelum rapat, buat *caption* di medsos dari kurang lebih sekitar 100-an yang komentar, yang paling banyak dikomentari dua. Satu, tentang tiang-tiang PLN yang ada di rumah warga, itu. Itu dulu pemasangannya *gimana* ya, dulu? Apa ada perjanjian, ada kontrak, sehingga sekarang *kok* orang keberatan.

Yang kedua, yang lebih dari 50 komentar yang bertanya adalah tentang harga listrik pulsa. Ini PLN harusnya mampu menjelaskan ini saking banyaknya orang bertanya. Dia membeli 100.000, dia mendapatkan 62,5 kWh. Nah, ini berubah dari 100.000, kalau beli pulsa kan pulsa *handphone* kan jelas *tuh* kelihatan ya, ketika masuk, angkanya masuk. Coba *dijelasin* sedikit, mungkin ada ahlinya di sini. Jelasin tentang membeli 100.000 *kok* dapatnya 62,5 kWh? Bagaimana prosesnya itu sehingga segitu *lah* dia harus dapat? Membeli satu juta, dapatnya 500,25 kWh. Ini tolong dijelaskan. Itu untuk PLN, tidak banyak memang, tapi sekarang untuk Danareksa.

Tanggal 28 Desember tahun 1976, 48 tahun yang lalu, jadi PT Danareksa ini didirikan, betul, Pak, ya? Betul ya, Pak Yadi? Pak Yadi mungkin *enggak* baca, saya tadi dapatnya dari hasil *ipil-ipil*. Jadi, tugas pokoknya KUR-nya adalah pasar modal, pasar uang. Jadi, pembiayaan termasuk juga pasar amanat. Kalau di sini disebut sebagai semacam *trust fund*, semacam surat berharga. Tahun 2022 ketika Danareksa dijadikan *holding*, masuk ke wilayah yang sangat besar sekali. Jadi, tidak lagi urusan, KUR-nya urusan bidang keuangan tetapi juga masuk ke wilayah kawasan energi. Tadi masuk ke urusan pertanian, bahkan masuk ke urusan, di sini ada untuk industri *smelter*, nikel. Jadi, sektor daur ulang tekstil dan alat kesehatan. Jadi, ke

mana-mana masuknya ini. Tolong di, apa namanya, nanti suatu saat, Pimpinan, dibuat yang lebih khusus, karena wilayah masuk Danareksa ini sudah ke mana-mana.

Terus, khusus urusan berkaitan dengan persoalan penyediaan air. Saya berharap betul ini Danareksa ketika menyiapkan kawasan yang melakukan eksploitasi terhadap air, tidak dalam arti membabi buta. Ya, ini prinsip, karena sesungguhnya air itu untuk rakyat. Jangan sampai pengembangan kawasan akhirnya merugikan air untuk rakyat.

Sudah banyak terjadi, apalagi kita di beberapa tempat mengalami defisit air. Jangan kegandrungan Danareksa menyiapkan pembiayaan untuk kawasan, selanjutnya pertumbuhan industri mengambil air-air. *Kan* kemungkinannya hanya dua, kalau Danareksa main di wilayah air, kemungkinan hanya dua. Satu, akan mengambil air dari mata air. Nah, sampai hari ini belum pernah ada yang mengumpulkan air hujan. Yang kedua, atau membuat sumur bor. Dan itu dua-duanya akan merugikan rakyat. Tolong dipikirkan dengan baik, bagaimana berusaha agar memberikan perhatian tidak merugikan lingkungan, berkesinambungan dan tidak merugikan rakyat.

Kira-kira begitu, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Selanjutnya kami persilakan, Mba Rieke Diah Pitaloka.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om Swastiastu,*  
*Namo Buddhaya,*  
Salam Kebajikan,  
Rahayu,

**Yang kami hormati Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI DPR RI,  
Yang kami hormati Direktur Utama PLN yang diwakili saat ini oleh  
Direktur Distribusi, kemudian  
Direktur Utama PT LEN Industri, dan  
Direktur Utama PT Danareksa,**

Untuk Danareksa, saya *no comment*, karena dari awal saya melihat Danareksa harusnya lebih fokus pada penyehatan BUMN-BUMN yang dititipkan dan wilayah kerjanya terlalu banyak, *multi* sektor.

Kemudian, untuk PT LEN Industri. Seperti yang saya sampaikan, saya membu, memberikan dukungan penuh untuk penguatan industri pertahanan, khususnya yang ada dalam wilayah otoritas PT LEN Industri, begitu. Malah



saya mengatakan ini PMN-nya kurang ya, karena peluru saja kita masih impor. Andaikata PT LEN ini kuat, peluru kita tidak perlu impor. Berapa, Pak, total peluru yang diimpor setiap tahun, kira-kira?

**DIREKTUR UTAMA PT LEN INDUSTRI (BOBBY RASYIDIN):**

Kapasitas produksi kami itu 400 juta butir per tahun. Nah, sementara *backlog* yang harus kita penuhkan itu sekitar 1 sampai 1,5 miliar butir per tahun. Jadi, cukup banyak.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Jadi, impornya berapa?

**DIREKTUR UTAMA PT LEN INDUSTRI (BOBBY RASYIDIN):**

Hampir satu miliar per tahun.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Termasuk dari Serbia ya, Pak, ya?

**DIREKTUR UTAMA PT LEN INDUSTRI (BOBBY RASYIDIN):**

Iya termasuk dari Serbia.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Dan Kroasia?

**DIREKTUR UTAMA PT LEN INDUSTRI (BOBBY RASYIDIN):**

Negara-negara situ, Bu.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Ya negara-negara situ yang begitu *aja*, bisa ya, Pak, ya. Industri pertahanannya luar biasa. Saya hanya mengingatkan saja, jangan lupa, kalau saya tidak salah, ada peraturan perundang-undangan ketika ada importasi peralatan pertahanan, begitu. Itu kalau saya tidak salah. Ada aturan untuk *technical know-how* untuk alih teknologinya. Semoga itu bisa lebih ditindaklanjuti, karena supaya PT LEN lebih kuat dalam teknologinya.

Saya masuk ke PLN saja. Saya ingin bertanya, izin, Pimpinan. Berapa, Bapak, jumlah desa sesungguhnya yang belum terlistriki, Pak? Pak Direktur? Pak Direk, benar ya Direktur? 6.500 desa. Saya membaca di *tirto.id*, pernyataan Ditjen Ketenagalistrikan, 10 Juni 2024, Triwulan I 2024, daerah yang belum berlistrik itu hanya 0,13% atau 112 desa/kelurahan. Bapak tadi mengatakan ...



**DIREKTUR DISTRIBUSI PT PLN (ADI PRIYANTO):**

Kemarin *kan* termasuk yang ...

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Pak, izin, Pak.

**DIREKTUR DISTRIBUSI PT PLN (ADI PRIYANTO):**

Kalau yang di Pak Dirjen, itu kemarin termasuk yang non PLN.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

112 Desa?

**DIREKTUR DISTRIBUSI PT PLN (ADI PRIYANTO):**

Ya. Jadi, kalau non PLN itu masuk rasio elektrifikasi nasional. Jadi, yang sekarang di *bridging* dengan, apa, PLTS SHE, listrik dengan surya yang diberikan ke desa-desa.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Itu 112 desa?

**DIREKTUR DISTRIBUSI PT PLN (ADI PRIYANTO):**

Iya, itu termasuk yang dihitung rasio elektrifikasi.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Iya 112 desa. Kalau dari Bapak, tadi berapa, dari PLN?

**DIREKTUR DISTRIBUSI PT PLN (ADI PRIYANTO):**

Yang PLN, kalau misalkan itu nantinya *kan* diganti semua dengan PLN. Itu totalnya 6.500 desa.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

6.500 desa. Baik, Bapak, terima kasih.

Ada 600, 6.500 desa yang belum teraliri listrik PLN setelah sekian puluh tahun kita merdeka ya, Pak, ya? Tentu sama dengan teman-teman Komisi VI lainnya, untuk urusan listrik desa ini kami memberikan dukungan. Namun demikian, tentu saja seperti yang saya sampaikan pada FGD. Terima

kasih sudah dilengkapi dengan PMN, data PMN-nya begitu. Hanya belum ada data dividennya.

PMN 2015 itu 5 triliun, 2016; 23,56 triliun, 2019; 6,5 triliun, 2020; 5 triliun, 2021; 5 triliun, 2022; 5 triliun. Tidak diberi PMN 2023 dan 2024, usulan 3 triliun di 2025. Jadi, total PMN yang diterima oleh PLN sebesar 49,81 triliun, 49,81 triliun. Dengan 49,81 triliun, jumlah desa yang dilistriki 7.980 desa. Pemaparan halaman 11 ya, Pak, ya. 49,81 triliun untuk desa yang dialiri listrik 7.980 desa, begitu. Nah, di sisi lain, tadi mengatakan ketika 2023 sampai 2024 tidak keluar PMN-nya, maka diputuskan utang ya, Pak?

**DIREKTUR UTAMA PT LEN INDUSTRI (BOBBY RASYIDIN):**

Iya.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Betul. *Global bond* 2022 berapa, Pak, pinjamnya?

**DIREKTUR DISTRIBUSI PT PLN (ADI PRIYANTO):**

Ini soalnya sumbernya *kan* dari berbagai sumber.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Ya dari berbagai sumber. Intinya ketika PMN itu tidak keluar, tapi program listrik desa harus jalan, akhirnya pinjam?

**DIREKTUR DISTRIBUSI PT PLN (ADI PRIYANTO):**

Iya.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Ya, pinjam. Pinjamannya, total seluruh utang PLN itu ada 450 triliun. Sudah berhasil dibayar, sisa 396 triliun. Kalau kita tidak memberi PMN lagi, maka keputusannya akan utang, begitu?

**DIREKTUR DISTRIBUSI PT PLN (ADI PRIYANTO):**

Iya, nanti di.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Sama dengan teman-teman semalam. Jadi, kalau kira-kira, dipastikan saja akan diberi PMN itu akan cair atau tidak. Kita desak PMN untuk listrik desa itu cair atau tidak. Jangan seperti *blackmail gitu loh*, Pak. Kalau *enggak* dikasih PMN, kami akan *ngutang*, padahal utang PLN itu *udah* besar loh, 396 triliun, begitu.





Di sisi lain, sebelum terjawab dari pemaparan, meminta PMN 3 triliun. Tapi dari kunjungan spesifik Komisi VI untuk kelistrikan IKN di Balikpapan dijelaskan, bahwa 2023 sampai 2024, APLN atau anggaran PLN sudah habis 3 triliun untuk IKN. Sampai 2045 nanti dibutuhkan 45 triliun dan dikatakan itu akan dari APLN. Sementara, Anggaran PLN itu sendiri sumbernya juga ya lewat utang itu, sampai 396 triliun.

Saya hanya mengingatkan, Pak, prediksi sampai listrik di IKN 2045, 45 triliun, bukan hanya sekedar barangkali kita sudah tidak menjabat. Barangkali kita sudah sama-sama *innalillahi*, Pak, ya. Lalu, ini akan dibebankan pada utang, tambahan utang yang luar biasa besar, begitu.

Saya agak bingung, begitu. Di sisi lain minta 3 triliun, tapi untuk IKN sendiri pakai APLN. Menurut staf Bapak yang presentasi, saudara Robert ya, dan itu dipaparkan pakai PPT, sudah diambil 3 triliun dari APLN. Padahal program listrik desa ini lebih dulu rencananya dari IKN. Jangan-jangan, ini asumsi saya, mungkin bisa salah. Jangan-jangan yang seharusnya anggaran untuk listrik desa, mesti dipindah dulu untuk IKN. Sampai hari ini, permohonan saya untuk memperoleh jawaban, diambil dari pos mana itu anggaran PLN untuk IKN. Dan bagaimana nanti *returnnya*?

Bahkan sampai 45 triliun di tahun 2045 yang barangkali paling tidak saya mungkin sudah *innalillahi* itu, Pak, dari mana cara pengembaliannya? Dengan demikian, kalau persoalan PMN tentu akan dibahas dan diputuskan lebih lanjut, tetapi keterbukaan, transparansi penggunaan PMN di sini hanya dijelaskan 100%, 100%, 2021; 99,9%, 95,86%. Ini *kan* sebetulnya hampir setiap tahun PLN mendapatkan PMN. Hanya di dua tahun tidak dapat, kalau enggak dapat, *gua ngutang*. *Kok* buruk, *kok* kesimpulannya hanya *ngutang, gitu*. Apa strategi lain seandainya PMN ini tidak dikeluarkan?

Mau *ngutang* lagi, Pak? Padahal Bapak utangnya masih gede. Utang. Ya, betul. Semalam teman-teman mengatakan, ya sudah tidak usah dijalankan, jangan dijadikan alasan untuk utang lagi, begitu maksud saya. Jangan sampai utang dibawa mati juga, Pak. Ya, meskipun bukan kita pribadi, tapi kalau kita mengambil keputusan, sebetulnya utang itu juga jadi tanggung jawab kita.

Mungkin dari saya itu saja, Pak. saya masih mengejar sumber dana untuk kelistrikan IKN karena *kok* bisa berbarengan *gitu* ya, dipakai 3 triliun untuk IKN, di sisi lain minta 3 triliun untuk listrik desa. "Kalau *gue* enggak dikasih PMN, *gue ngutang* lagi". Saya yakin Bapak cerdas punya strategi lain, Pak, untuk mengatasi ini.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**WAKIL KETUA RAPAT (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):**



Baik, terima kasih.

Sudah tidak ada lagi yang, oh Pak Harris Turino. *Kok* namanya dihapus di situ?

**F-PDIP (DR. IR. HARRIS TURINO, S.H., M.SI., M.M.):**

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan, dan  
Rekan-rekan Anggota Komisi VI,  
Yang terhormat Direktur PLN,  
Dirut LEN, dan  
Direktur Danareksa,**

Pertama, tentang PLN. Ini datanya, Pak Adi, Bapak minta 3 triliun, *tapi* kemudian saya lihat ini di *roadmap* Lisdesnya ternyata sudah disiapkan. *Roadmap*-nya jelas 2026, Bapak minta lagi 7 triliun dan 2027 Bapak minta lagi 5,86 triliun, sehingga dari total ini masih kira-kira sekitar 15,8 triliun.

Pertanyaan yang paling sederhana, bahwa 15,86 triliun ini, ini untuk melistriki berapa desa? Dan apakah setelah 2027 selesai, Pak? Atau masih ada lagi, ya? Selesai kapan ini? Selesai dalam arti 100% yang sudah dilistriki oleh PLN. Karena 99,83% kan sudah terlistriki, tinggal berikutnya seperti apa. Ini untuk PLN. Dan saya minta tadi RPJMN-nya dicabut sebagai dasar hukum, Pak, karena sudah tidak relevan. Tadi, Pak Darmo juga sudah sampaikan. Lucu kalau kita pakai dasar yang sudah tidak relevan.

Yang kedua, mengenai PT LEN. Seperti saya sampaikan di PT LEN, ini bisnisnya yang Bapak paparkan kemarin, *market*-nya sedemikian besar bahkan *captive*, ya *kan*. Saya sudah berharap ini berarti Indonesia punya *Indonesian defence company* yang luar biasa. Ternyata ya pasarnya atau *revenue* Bapak cuma 57 triliun, ya masih sangat kecil, Pak. Sehingga memang permintaan PMN sebesar 2 triliun ini secara prinsip, menurut saya layak untuk didukung.

Tapi kembali lagi, pastikan bahwa 5 anak Bapak, itu juga bukan perusahaan yang sehat, Pak, ya. Di samping mengandung virus, ini masa lalunya juga tidak bagus, ya. Walaupun sebagian sudah dilakukan restru, Pak, ya. Jadi, pastikan bahwa ini memang, PMN ini digunakan untuk menjadikan LEN sebagai ya perusahaan yang memang ke depannya mampu benar-benar menjadi perusahaan yang layak dibanggakan, Pak.

Yang ketiga, mengenai Danareksa, ya. Saya masih ada *reserve*, Pak, walaupun tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ternyata Bapak tidak akan bikin pabrik gula, *gitu* ya. Bapak *enggak* akan bikin pabrik *bioethanol*, ya



tetapi kemarin di dalam FGD, *kan* yang muncul seolah-olah ini mau bikin *on farm*-nya gula 500 hektar dan tujuannya akan menyelamatkan *gap* kebutuhan gula nasional, karena Bapak berangkat dari situ.

Indonesia *supply* gula, produksi gula hanya 2 juta ton, sementara *demand*-nya 7 juta ton. Sehingga, kekurangan ini akan dibantu, diinisiasi oleh Danareksa. Menurut saya *kadohan*, Pak. Indonesia sudah mulai impor gula ini 1973, maka waktu PTPN kemudian mengusulkan mengenai *sugar.co* dan mengatakan bahwa masalah ini akan selesai pada 2027, saya *ngomong*, "Mimpi di siang bolong". Nah, kemudian kemarin dari paparan Bapak yang saya dapat ada lagi *nih* yang mimpi lagi ini, sehingga ini hari ini sudah diklarifikasi, ya.

Kemudian, *concern* beberapa rekan mengenai permasalahan di banyak kawasan industri. Ini juga harus menjadi perhatian Bapak.

Dan yang terakhir mengenai air ini, Pak, ya. *Water*, Pak. Ini saya juga masih *reserve* di *water* ini, Pak, ya. Tujuannya ini apakah Bapak mau *ngasih* kerjaan sama anak-anaknya yang pada sakit itu atau apa? Atau memang ditugaskan oleh pemerintah? Nah, kalau ditugaskan oleh pemerintah, yang menugaskan siapa? Ada *oret-oretannya enggak*, Pak,? Ya, karena jang-jangan lisan, Pak. Celaknya ini, kasus Covid dulu, Pak. Banyak perusahaan BUMN Farma ditugaskan secara lisan di dalam rapat *zoom*, menyediakan 2 juta Covid, apa, vaksin, ya *kan*. Lisan. Karena yang menyediakan orang yang menakutkan, wah perusahaan farmasi siap. Dari 2 juta, diproduksi 10 juta, 5 juta dibeli oleh pemerintah, 5 jutanya tidak terjual, tidak dibeli oleh pemerintah, 10 juta yang lain, ini masih bahan baku sisa. Mau *nagih* ke siapa? Suratnya *enggak* ada ya. Ini juga Bapak ketika *ngomong* masalah IWF ini, ya ini tolong siapa yang menugaskan? *Clear*, kalau memang Bapak mengatakan bahwa ini penugasan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

*Walaikumsalam,*

Dari meja Pimpinan?

**WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Saya *dikit. Makasih*, Mas Bimo.

Untuk PT LEN ya, Pak. Secara prinsip, sebenarnya yang dipaparkan oleh Bapak, itu saya bisa mengerti. Pertanyaan pada waktu FGD, coba dibandingkan, Pak, kenapa Bapak tidak bisa mengambil pembiayaan di luar



PMN? Apakah misalnya *return*-nya terlalu kecil atau seperti apa? Karena kita juga *kan* tidak paham secara spesifik produk-produk AlpaHankam ini. Ya, nanti Bapak tolong kasih *reasoning* seperti itu ya.

Untuk PLN ya, Pak. Saya masih tetap mengatakan bahwa sesayang-sayangnya kita sama listrik desa, menurut saya ini adalah kewajiban negara untuk menjalankan ya, Pak. PLN sebagai korporasi, boleh ditugaskan menjalankan listrik desa, tapi tidak bisa melalui mekanisme utang, karena memang tidak akan bisa menutupi investasi yang keluar membangun listrik desa.

Jadi, ini nanti menurut saya dalam Raker dengan Pak Menteri BUMN, ini harus kami tanyakan. Daripada Bapak tiap tahun ya harus mengutang lagi untuk menjalankan listrik desa, kalau memang tidak ada komitmen untuk pencairan, menurut saya Bapak jangan *ngutang* lagi. *Ntar* lama-lama Bapak rapat di sini, persoalan utang listrik desa. Ini saya terus-terang *aja*, Pak.

Jadi, kita sangat dukung *nih* listrik desa. Dan Komisi VI selalu mendukung saya kira, tapi kalau memang itu tidak merupakan, ya tidak mendapatkan prioritas untuk pencairan anggaran, ya jangan, Pak. Nanti lama-lama beban PLN akan terlalu besar ya, kalau terus-menerus itu terjadi. Saya rasa itu, Pak, jadi supaya *clear*. Jadi, bukan Komisi VI tidak mendukung listrik desa juga, ini karena sejak awal kita mendukung listrik desa.

Nah, untuk Danareksa. Terima kasih sudah dijawab *concern-concern* kami pada waktu FGD, Pak. Jadi, saya sudah lebih, apa, paham, dari mulai skema bisnis dan lain sebagainya. Yang saya masih, apa, perlu diberikan penjelasan oleh Pak Yadi, soal IWF dan KEK ini. Yang KEK agak lebih ini kali ya, yang KEK Tebu, ya.

Jadi, Bapak nanti membangun kawasan, ya *kan*? Lalu, kemudian Bapak mengelola kawasan, ya. Terus berarti Bapak dapat *income dong* dari pengelolaan kawasan, *kan*? *Oke, oke*, jadi itu seperti kawasan industri yang lainnya yang sudah memang selama ini dalam penanganan Danareksa, ya? *Oke*, paham.

Nah, yang *water*, Indonesia *Water Fund* ini. Bapak bangun apa *nih*? Kalau di sini *kan* sebagai katalis, mungkin bisa jawab langsung *aja*, Pak. Sebagai katalisatornya, apa maksudnya *gimana*?

#### **DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Jadi, yang dibangun kami ini dalam contohnya di SPAM Bandung, Pak. Kita bangun transmisi dari, apa, istilahnya kita *from source to tap*. Jadi, dari, dari sungai transmisinya kita bangun, sampai kepada jalur distribusinya. Jadi, langsung masuk ke sambungan rumahnya juga.

Jadi itu yang dibangun dari awal dan rencananya kita akan mendapatkan konsesi 30 tahun, Pak. Dan dari konsesi kita bentuk SPV tadi, Pak, di mana Danareksa sebagai salah satu *equity* investornya di situ. Tapi



kita enggak semua, ada tiga partnernya seperti saya jelaskan tadi malam, ada Danareksa, ada partner dari luar negeri, dari Prancis dan dari Cina, Pak.

**WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Berarti ada perusahaan yang...

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Perusahaan asing, Pak. Dan tentunya utangnya dari perbankan, *gitu*. Dan sekarang kita ada komitmen dari Cina juga mau *nalangin* dulu, Pak. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, setelah itu jadi, kita yang punya namanya *IWF Platform*, Pak, di mana investornya sudah menunggu untuk setelah bangun, setelah dipersiapkan dan dibangun, kemudian kita lempar ke mereka untuk dapat dibeli. Kita mendapatkan uangnya untuk kita meneruskan kembali proyek-proyek lainnya.

**WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Water line*-nya?

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

*Water line*-nya, kira-kira *gitu*, Pak. Jadi, kita *recycle*, Pak, dan *along the way* tadi, sekaligus menjawab yang lain juga, Pak, izin, Pak. Itu kita memastikan bahwa BUMN di bawah kita itu mendapatkan manfaatnya dari sisi *technical* maupun transfer teknologi.

Karena seperti contoh, Pak, yang kemarin itu *kan*, kalau karya kita ada Nindya Karya di dalamnya. Kita ingin mereka fokus kepada SDA, Pak. Jadi, ini *kan* SDA *lah*, jadi *gitu*. Jadi, dan *on the river bank side*, di kawasan itunya, kita punya PJT 1, PJT 2, yang mengelola aliran-aliran sungai. Jadi, kita buat sinerginya, Pak, di mana pada saat persiapan proyeknya pun kita menggunakan konsultan karya yang di, apa, diamanahkan kepada kami.

Nah, konsultan karya itu bekerja sama dengan tadi mitra strategis kami yang dari Swiss, Pak, dari Prancis. Jadi, mereka pun belajar bagaimana menyiapkan proyek air. Jadi, kami memastikan ...

**WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Dana bergulir *lah* ya?

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Dana bergulir, Pak, *gitu*.



**WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Nah, Bapak dapat *income*-nya dari?

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Dari penjualan air, Pak.

**WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Penjualan air juga dapat ya?

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Penjualan air, iya.

**WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Iya. *Oke*, paham. *Makasih. Makasih*, Pak Bimo.

**F-PDIP (DR. IR. HARRIS TURINO, S.H., M.SI., M.M):**

Mungkin nanti dijawab ya, *kok* masuk situ, *gitu*? Yang *nugasin* tuh siapa? Yang *nyuruh*.

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

*Enggak*, Pak. Ini izin, Pak, ini memang inisiatif kami, Pak. Bukan, Bu. Kita *enggak* pernah *ngomong* penugasan, Pak. Di mana, Pak? Oh izin, Pak, saya koreksi kalau *gitu*, Pak, ya. Oh, pakai *dong*, Bu. Pakai, Bu, pakai. Kami bisa tunjukkan ke Ibu. Oh, inisiatif korporasi, *sorry*. Iya ya, bukan dari.

Siap. Oh, *enggak*, Pak, *enggak*, Pak, *enggak* punya uang, Pak.

**WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Bimo.

Pertama, tentu terima kasih sudah memberikan paparan yang baik di rapat dengar pendapat ini. Untuk PLN, saya merasa dalam kasus listrik desa ini, PLN dibebani oleh tugas yang tidak seharusnya diberikan kepada PLN, dari sisi pembiayaannya.



Bahwa dari sisi operasionalisasinya, kegiatannya, karena memang PLN yang ada di bidang itu, wajar PLN diberikan tugas untuk melakukan pemasangan listrik desa sampai ke pelosok-pelosok. Tapi, seharusnya karena ini adalah tugas negara, seharusnya uangnya adalah uang yang diberikan oleh negara, PLN yang mengelola.

Skemanya seharusnya, menurut saya ini, seharusnya tidak mesti lewat PMN. Mestinya Kementerian ESDM punya anggaran, PLN yang melakukan kegiatannya. Iya, seperti, seperti LEN, kemudian diambil oleh Kemenhan. Menjadi sangat tidak adil bagi PLN menurut saya, PLN ditugasi dengan tugas yang sangat berat, bahkan biayanya bisa lima kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat dari pemasangan jaringan secara normal di tempat-tempat yang normal.

Coba bayangkan kalau pemasangannya di daerah terpencil, menyeberang pulau, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memasang jaringan listrik desa di seberang pulau yang sangat terluar itu? Dan ini menjadikan keuangan PLN, menurut saya, menjadi tidak sebagaimana mestinya.

Kalau itu kemudian pembiayaannya dari pemerintah, PLN pasti mendapatkan keuntungan atau sekurang-kurangnya tidak merasa di, tidak dirugikan dalam sisi pembiayaan, impas *lah*. Kalau impas *kan* bagus saja, *gitu*. Perusahaan negara ditugasi oleh negara tanpa ada keuntungan, *oke-oke* saja menurut saya.

Tapi, kalau ini dibebankan kepada PLN, meskipun itu dananya dari PMN, menurut saya itu menjadi tidak adil. Jadi, kita mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok. Tetapi kalau bisa, sebenarnya dananya adalah dana negara, dalam hal ini dana kementerian atau lembaga.

Yang kedua, dari LEN. Saya sebenarnya cukup terkejut dengan paparan kemarin. Saya itu karena bangga sekali dengan Indonesia, saya merasa Indonesia itu memiliki alutsista yang dahsyat *lah*. Yang sekarang tren *kan* drone, ya. Drone ya bukan Dro, kalau Dro sudah banyak. Drone, ternyata dronanya itu sedikit sekali dimiliki oleh Indonesia.

Karena itu pemberian PMN ini, kalau itu dialokasikan pada pembuatan alutsista oleh industri pertahanan kita, itu sangat layak untuk kita dukung. Bahkan menurut saya, kalau tujuannya untuk itu, PMN ini jauh dari kebutuhan yang sebenarnya.

Kalau drone kita baru punya 4, *kan ngeri*, Pak. Sementara negara yang sebaya kita, artinya yang setara kitalah kira-kira itu, bahkan yang mungkin dari sisi ekonomi lebih kuat kita dibanding mereka, itu memiliki pertahanan drone yang jauh lebih besar. Sebut saja Iran, Turki. Teknologi mereka sangat canggih dan jumlah kepemilikan mereka terhadap Drone jauh di atas kita, bahkan mereka memiliki ribuan Drone. Saking banyaknya sampai ada yang dikirim ke negara tetangga itu, saking banyaknya. Artinya sampai



ditembakkan ke negara tetangga atau dipinjamkan *enggak* taulah ke mana. Jadi, menurut saya ini memang harus menjadi perhatian kita semua dan letak strategisnya bukan hanya di sektor pertahanan, tetapi alutsista ini adalah produk substitusi impor.

Jadi, semakin kita perkuat di alutsista ini, semakin ketergantungan kita kepada impor itu menjadi berkurang. Itu artinya apa? Artinya juga dari sisi neraca perdagangan kita menjadi lebih bagus, dari sisi kedaulatan kita, teknologinya bisa kita miliki sendiri, kita operasionalkan sendiri, kerahasiaannya juga kita pegang sendiri, jadi memiliki nilai strategis yang sangat baik.

Saya ingin LEN ke depan memfokuskan pada hal-hal ini saja. Hal-hal yang bisa memproduksi alutsista buatan dalam negeri yang teknologinya memang canggih, terbaru, memiliki keandalan yang luar biasa, bisa diproduksi oleh anak bangsa sendiri.

Yang ketiga, tentang Danareksa. Sebenarnya sudah banyak ulasan-ulasan dari rekan-rekan tadi tentang Danareksa. Intinya, ya ungkapan sayang kepada Danareksa supaya Danareksa itu dalam hal membina atau menyehatkan perusahaan-perusahaan yang tidak sehat di bawah kementerian itu fokus pada tugas yang sebenarnya, yaitu tugas perbaikan, penyehatan, dan tugas penguatannya.

Kalau memang dianggap program-program ini memang cocok untuk program penyehatan dan penguatan, ya kita tidak keberatan. Tetapi memang kita perlu diyakinkan benar-benar, bahwa program ini memang cocok untuk langkah penyehatan dan penguatan BUMN di bawah Danareksa, di bawah pembinaan Danareksa, khususnya di bawah PPH.

Langkah ini harus dipastikan tepat. Karena kalau tidak tepat, kata pepatah yang saya baca dalam buku-buku organisasi, itu obat kadang lebih berbahaya daripada penyakitnya. Kita tidak berharap, kita tentu saja berharap obat yang diberikan oleh Danareksa ini bisa mengobati penyakitnya, tidak menambah penyakit penyerta yang bahkan lebih berat bagi BUMN-BUMN yang saat ini mengalami penyehatan di Danareksa. Barangkali itu, Pak Bimo.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

*Walaikumsalam,*

Kami persilakan, Pak Ketua.

**WAKIL KETUA RAPAT (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):**



Saya menambahkan sedikit. Tadi Pak Sarmuji sudah menyinggung soal tugas listrik desa. Saya mau menanyakan soal dasar hukumnya penugasan listrik desa kepada PLN, Pak Adi. Itu kalau dijelaskan di sini *kan* di Undang-Undang 19, Undang-Undang 30, Perpres Nomor 14, Perpres Nomor 18. Seingat saya waktu itu, seperti dijelaskan oleh Bapak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, bahwa setiap penugasan itu pada akhirnya nanti harus ditandatangani bersama di antara menteri terkait. Kemudian juga melibatkan Menteri BUMN dan BUMN terkait. Nah, terkait dengan program listrik desa ini, apakah ada, apa, komitmen bersama yang ditandatangani antara Menteri BUMN atau bersama Menteri ESDM dan PLN? Ini yang saya kira penting untuk kita bicara soal penugasan, sebagaimana sudah berkali-kali disampaikan oleh Menteri BUMN. Dan kita semua mengetahuinya di sini. Jadi, makanya tadi Pak Harris menanyakan kepada Danareksa, penugasan itu dasarnya yang mana? *Gitu*. Itu karena Menteri BUMN sudah menyampaikan bahwa setiap penugasan pada BUMN itu harus ditandatangani bersama-sama oleh Menteri BUMN dan kementerian terkait. Dan saya kira program listrik desa ini sangat penting, cuma apakah dasarnya itu memang ada penugasan tertulis?

Kemudian, yang kedua soal LEN. Ada komitmen rupanya pembelian kepada LEN oleh Kementerian Pertahanan, sebesar 260 miliar. Potensi kontrak tahun 2024, ya potensi kontrak tahun 2024, pengadaan UEV 2024 dari Kementerian Pertahanan sebesar 260 miliar, kalau yang tercatat di sini. Nah, apakah itu *terrealisir* atau belum? Nah, kalau memang *terrealisir*, pasti ada keuntungannya buat LEN.

Maksud kami, pemberian PMN terhadap LEN ini pun kita berharap, karena ini bukan hanya bersifat investasi tetapi juga bersifat bisnis. Saya kira harus ada juga timbal balik keuntungan yang harus didapatkan LEN dalam, apa, pengadaan yang disiapkan, terutama kalau memang itu terkait dengan kontrak di kementerian terkait. Ini sangat penting menjadi masukan buat kita, supaya bisa melihat bagaimana prospek bisnis industri pertahanan ke depan.

Jadi, kalau ada preseden bahwa pemberian PMN ini ternyata membantu struktur permodalan, kemudian menambah laba perusahaan bahkan juga seperti yang diinginkan Pak Sarmuji, bahwa ada investasi di bidang R&D yang menyebabkan LEN bisa memproduksi lebih banyak, lebih bagus, lebih massal, dan lebih canggih. Itu peralatan-peralatan pertahanan dan keamanan, barangkali tahun-tahun mendatang seperti yang disampaikan oleh LEN, bisa terus dipenuhi oleh pemerintah melalui skema PMN.

Kemudian, yang terakhir Danareksa. Saya kira tugas Danareksa kemarin *kan* dan sampai hari ini saya kira berat, makanya saya sering menyampaikan kepada Pak Menteri, bahwa Danareksa ini kalau dulu ada dua Wamen, kira-kira Danareksa ini Wamen ketiga. Karena di dalamnya itu ada banyak BUMN, *gitu*.

Nah, cuma Wamen ketiga yang miskin *lah* kira-kira begitu. Kalau yang lain, kaya-kaya, ini yang miskin. Nah, apa, kalau di undang-undang yang

miskin itu dilindungi, Prof. Cuma begini, saya tahu *lah*, ini maksudnya kan untuk menyehatkan. Ini bagian dari upaya untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danareksa.

Saya kira yang juga perlu dijelaskan adalah kenapa Danareksa memilih perusahaan-perusahaan ini, bukan perusahaan-perusahaan yang lain? *Gitu* ya. Karena saya mendapatkan paparan, bahwa perusahaan-perusahaan lain ini sudah mulai lebih sehat. Apakah yang dipilih yang sakit atau memang justru yang ini yang harus, yang sebenarnya sedang lebih sehat atau akan sehat kalau seandainya disuntik dengan modal produktif begini? Ini *kan* modal produktif. Ini kalau dalam kasus Danareksa, saya kira ini akan menjadi PMN pertama barangkali yang akan disuntikkan melalui Danareksa.

Nah, yang pertama itu harus berkesan. Kalau dia *nggak* untung, itu artinya kesannya buruk. Dan sangat apa, akan menjadi catatan untuk di kemudian hari, akan ada PMN berikutnya untuk membantu penyehatan perusahaan-perusahaan itu. Jadi, pesan saya, kalau memang ini betul-betul dipilih karena berdasarkan entah apa pertimbangannya ya, betul-betul harus punya kesan yang baik.

Saya kira itu, Pak Bima.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Kita akan segera minta respons dari mitra kita. Yang intinya teman-teman tadi menekankan beberapa hal dari FGD kemarin, sudah cukup banyak yang direspons dari dasar pemberian PMN, latar belakang pemberian PMN atau pengajuan, latar belakang pengajuan, juga peruntukannya, sudah banyak dijelaskan cukup detail oleh PT PLN maupun LEN dan Danareksa.

Dan kita berharap tetap memperhatikan tentang efektivitas penggunaannya. Kalau tentang programnya sudah, tinggal nanti, kalau *toh* disetujui efektivitas penggunaan PMN ini perlu, ya, secara transparan dan akuntabel dalam penggunaan PMN.

Banyak hal yang kena masalah ya, potensi risiko, moral *hazard* dari jajaran pengguna atau direksi. Dan ini bisa dikontrol dengan pengawasan penggunaan PMN yang ketat, termasuk juga kami dari DPR maupun dari lembaga pengawasan lainnya. Kita tetap menginginkan bagaimana peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, *good corporate governance*, dengan manajemen risiko, dan itu sangat bagus secara khusus penggunaan dana PMN yang dimasukkan dalam rekening khusus itu dievaluasi secara berkala.

Dari PLN sudah dijelaskan tadi ya, soal infrastruktur kelistrikan yang, yang ditargetkan mencapai elektrisasi 100%, bahkan tekanan teman-teman sampai ke dusun, sebagaimana *project* itu bisa dilaksanakan. Kemudian juga disebutkan pentingnya proyek energi terbarukan, sejalan dengan bauran energi dengan pengurangan emisi.

Efisiensi operasional PMN harus disertai *command* PLN untuk meningkatkan efisiensi kurangi biaya produksi listrik. Kemudian, teman-teman juga beberapa sudah menyampaikan, Pak, tarif listrik yang berkeadilan itu penting, ya. Bagaimana melibatkan pihak independen untuk mengevaluasi banyak hal terkait PMN terutama, sebenarnya sejauh mana korelasi antara PMN dengan kinerja dan keuangan khususnya yang diuraikan oleh Pak Dirut tadi.

Kemudian, dari PT LEN, kita dukung penuh, karena ini banyak *project* strategis di sini, teknologi yang semakin berkembang. Kemudian, tadi banyak yang menyangkut masalah pertahanan yang kita juga masih miris dengan luasan wilayah kita, baik laut dan darat. Kita berharap bagaimana penguasaan teknologi ini penting untuk meningkatkan daya saing produk-produk kita, Pak, untuk mengurangi ketergantungan kita pada teknologi asing. Dan tentunya yang saat ini penting adalah PMN ini nanti kita harapkan ada peningkatan yang terkait dengan tingkat kandungan lokal, Pak, atau tingkat kandungan dalam negeri. Kita ingin ditingkatkan komponen-komponen dalam negeri, apalagi dengan harga dolar yang liar tak terkendali yang kita belum mengerti nanti sampai akhir tahun ini berapa.

Hal ini saya kira penting, supaya mempunyai dampak yang positif, berbagai hal yang diproduksi oleh, oleh PT LEN. Bahkan kalau tidak salah sudah ada perubahan peraturan menteri untuk bekerja sama dengan perusahaan asing yang terkait dengan industri-industri pertahanan kita.

Saya kira perlu dijajaki kembali, supaya hal yang terkait dengan kandungan lokal tadi, untuk komponen industri-industri kita, itu juga akan memperkuat rantai pasok industri pertahanan nasional kita. Yang mana kita ingin untuk pemberian PMN kepada PT LEN ini tentunya akan menjadikan PT LEN mampu mengurangi beban impor, Pak. Ini sekarang BUMN ini juga cukup penyumbang tertinggi untuk belanja impor barang kita. Demikian yang bisa kami sampaikan.

Untuk Danareksa kita berharap, Pak, saya juga baru mencermati Danareksa pada PMN tahun ini. Kita ingin memberikan dampak positif bagi perusahaan pertumbuhan perekonomian nasional dengan penguatan modal yang ada di Danareksa, ekspansi usaha, peningkatan investasi, dan percepatan transformasi, dan pengembangan ekosistem untuk BUMN.

Untuk industri, kita sudah banyak contoh, Pak, bagaimana sejak pengembangan Tangerang, kemudian sampai di Jabodetabek ini tidak terjadi *integrated industrial*, Pak, ya. Kalau kita *low cost, living costs* di area-area industri di Vietnam, di China, di Thailand itu efisiensi di tingkat produksi itu

memang terjadi *integrated industrial*. Minimal satu kawasan industri yang ter-*integrated* dengan, kalau soal kelistrikan, soal limbah, soal air itu hal yang biasa, tapi mata rantai *line of business*-nya itu saling bisa didesain untuk meningkatkan efisiensi *cost production*-nya. Juga buruhnya, kalau kita lihat dari Jababeka, MM2000, sampai Cikarang, sampai Delta Silicone, sampai Karawang itu, kenapa akhirnya banyak yang relokasi ke Jawa Tengah? Karena memang kawasan perburuhan itu menjadi daerah selam secara sosial. Karena buruh itu tidak terintegrasi dalam suatu *landscape area* industrial. Dulu mereka hanya, industri *estate* itu hanya jualan tanah.

Saya berharap bagaimana *living cost* yang selalu ditutup dengan UMR itu, kalau itu ikut digarap di dalam satu kawasan, itu akan cukup menutup *living cost* dari *cost* yang dikeluarkan oleh buruh. Tempat tinggal, tempat kesehatan, tempat pendidikan anak, kemudian transportasi akses ke pabrik, itu tidak seperti sekarang. Kalau kita lihat MM2000 bagus, mungkin Delta Silicon, MM2000, kemudian Jababeka, kemudian ada EJIB. Tapi buruhnya di sekitar luar itu, Pak, ya. Mereka *cost* biaya tinggi. Tangerang juga demikian, lari banyak *sunset* industrial yang akhirnya lari ke wilayah Jawa, yang untuk mencari upah buruh yang masih bisa menutup dengan *cost production*. Kalau mereka bersanding kemudian itu dengan Vietnam, juga dengan negara-negara ASEAN, upah buruh kita lama-lama juga dianggap tidak bersaing. Bukan karena untuk kesejahteraan, tapi karena tempat tinggal yang tidak diintegrasikan di dalam konsep pengembangan industri nasional, kawasan industri kita.

Itu tambahan saja, Pak. Begitu juga dengan kawasan-kawasan industrinya juga yang saling terintegrasi, tidak saling ego itu, Pak. Ini yang saya lihat mengapa banyak kawasan industri yang gagal. Karena mereka cenderung sesama kawasan juga tidak membagi produk-produk apa yang sebenarnya lebih dikhususkan di antara satu kawasan dengan kawasan yang lain.

Demikian dari Pimpinan maupun dari Anggota. Kami persilakan untuk direspons, karena kebanyakan adalah masukan-masukan terkait dengan PMN sekaligus juga di *closing statement*.

Kita mulai dari Dirut PLN, Pak.

**DIREKTUR DISTRIBUSI PT PLN (ADI PRIYANTO):**

Baik, terima kasih.

**Pimpinan Komisi VI,  
Bapak/Ibu sekalian Anggota Komisi VI,  
Teman-teman sekalian yang saya hormati,**

Pada prinsipnya memang bahwa kami sepakat, bahwa tugas kepada PLN adalah untuk melistriki seluruh nusantara, di mana ini adalah merupakan penugasan dari pemerintah, khususnya untuk Lisdes. Kami ini telah bersama



dengan Kementerian ESDM untuk memetakan bagaimana kita bisa melistriki seluruh nusantara, termasuk desa yang terpencil dan dusun-dusun, di mana seluruh desa-desa dan dusun tadi sudah ter-*mapping* dengan baik di *database* kami.

Nah, tentunya kami tinggal nanti melaksanakan saja, misalkan PMN 2025 nanti *disetujui* tentunya dengan dana yang ada, kami segera akan melaksanakan tugas dari pemerintah yang berupa PMN tersebut, untuk bisa menyambung sesuai dengan rencana kami di tahun 2025. Memang kami mempunyai rencana sampai tahun 2027, di mana nanti untuk *breakdown*-nya tergantung dengan penugasan pemerintah yang berupa PMN tersebut atau penugasan lain nanti yang disepakati, untuk bisa menyelesaikan sampai dengan tahun 2027. Saya kira saya sepakat dengan Bapak/Ibu Pimpinan Komisi.

Kemudian, selanjutnya tentunya kami menanggapi beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan khusus, seperti perencanaan di desa, di tempat-tempat yang nantinya akan berkembang, seperti halnya tadi Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, Pak, Pak Parta. Tentunya kami sudah punya perencanaan *demand*-nya berapa dan rencana *supply*, termasuk daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia dan itu kita tuangkan di dalam RUPTL kita. Nah, sekarang lagi proses untuk menyelesaikan RUPTL yang 2024-2033.

Kemudian, hal-hal khusus, ini tentang masalah tarif tadi ya. Memang tarif ini adalah berdasarkan daya. Kemudian, aturan tentang PPJ yang ada di daerah masing-masing. Nah, misalkan ini membeli 100.000 tidak mendapatkan pulsa 100.000, *gitu* ya, tetapi berdasarkan harga dari masing-masing tarifnya.

Contoh, ini misalkan saja tarif untuk 900VA, harganya per kWh adalah Rp1.352,00 per kWh. Tentunya nanti ditambah dengan PPJ, pajak-pajak, ini tidak pas mendapatkan 100.000, itu *kan*, berarti kan karena harganya memang lebih dari Rp 1.000,00, yaitu 1.352 ditambah dengan PPJ.

Kemudian, tentunya kami mengucapkan terima kasih ini atas masukan-masukan. Kami sudah catat semuanya dan tentunya nanti apabila ada yang hal-hal perlu dilengkapi, nanti akan kami sampaikan secara tertulis.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Selanjutnya kami persilakan ke PT LEN.

**DIREKTUR UTAMA PT LEN INDUSTRI (BOBBY RASYIDIN):**

Terima kasih, Pimpinan.



Kami mau merespons tadi tentang kenapa PMN, kenapa kami *request* PMN, bukan dari pembiayaan investasi yang lain? Jadi, di industri pertahanan ini, *cycle* industrinya agak berbeda sedikit dan lebih panjang.

1. Masalah skala ekonomi. Skala ekonomi di kami ini belum tercapai. Jadi, misalnya di Dirgantara itu fasilitas produksi itu 10 unit per tahun untuk bisa mencapai BEP, sedangkan *order to make* dari Kementerian Pertahanan itu hanya 4 sampai, 2 atau 3? 2, 3 unit per tahun. Itu kondisi yang pertama.
2. Tiga dari perusahaan di bawah DEFEND ID ini, itu dalam, dalam proses restru, sehingga fleksibilitas untuk mencari investasi dari sumber lain itu sangat terbatas sekali.
3. Seperti yang kami sampaikan tadi, itu *order to make*, di mana *cost* komponen dari *design engineering* dari perangkat-perangkat alutsista ini, itu berbiaya tinggi, Pak, berbiaya tinggi, sehingga kalau kita lihat secara ekonomisnya, *scale*-nya masih kecil, itu sulit untuk BEP jika kita harus mencarikan investasi untuk fasilitas produksi yang ada ini.

Kedua, Pak, kami berterima kasih sekali, fungsi kami DEFEND ID ini sebagai penugasan untuk mengakuisisi teknologi demi kedaulatan dan kemandirian Indonesia, terutama di teknologi Alpahankam. Tentunya pada ujungnya adalah untuk meningkatkan TKDN, mengurangi impor dan tentunya juga adalah mengurangi sensitivitas dari kita impor komponen-komponen penting.

Dalam hal ini kami selama ini juga terkendala untuk mengimpor beberapa komponen yang sangat penting buat kami. PT Pindad pernah mengalami permasalahan untuk mengimpor mesin pembuat peluru. Yang kedua adalah ada komponen-komponen impor yang ada relasinya, berkaitan dengan AITAR dan ekspor *license*, di mana kita tidak bisa memilikinya.

Dan tentunya lagi kami berharap dengan peningkatan kemampuan kami dalam memproduksi Alpahankam ini, kami akan menjadi salah satu rantai pasok di industri dunia. Demikian kami sampaikan, Pak Pimpinan.

Sekali lagi, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

*Walaikumsalam,*

Selanjutnya kami persilahkan dari PT Danareksa.

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**





Baik, terima kasih, Pimpinan.

Mungkin saya akan merespons beberapa hal terkait dengan masukan maupun pertanyaan. Tadi dari, terkait dengan penyerapan tenaga kerja dari sampaikan oleh Pak Rudi Hartono itu., memang kita menggunakan...

**F-PDIP (DR. IR. HARRIS TURINO, S.H., M.SI., M.M):**

Sudah pulang, Pak. Orang yang sudah pulang *enggak* usah.

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Baik, Pak, baik, terima kasih.

Pak, mungkin langsung tadi ke, mungkin tadi kalau dari Pak Harris, saya sudah jawab terkait dengan ini. Kalau Pak Nyoman, Pak, izin, Pak, saya menyampaikan bahwa justru penggunaan air di kawasan industri kita itu sebagian kita berikan kepada masyarakat sekitar, Pak, contohnya di KBN dan KIMA, itu yang pertama.

Yang kedua, kita ada program yang di KIMA, eh bukan KIMA, KIM Medan. itu kita air ABT, air bawah tanah yang digunakan oleh *tenant*, itu sekarang kita tutup, Pak. Jadi, kita langsung menggunakan air dari sungai yang pengambilannya itu sudah mendapatkan izin berupa SIPA, Pak.

Jadi, SIPA itu adalah yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR SDA untuk bisa mengambil air dengan mempertimbangkan baku air. Jadi, ada untuk irigasi dulu yang pertama, kemudian nanti ujungnya bisa dipergunakan untuk kawasan industri.

Jadi, tapi itu juga kita lebih *further* lagi, Pak. Jadi, kita pastikan air yang digunakan kita akan bikin *wastewater treatment* juga, Pak. Jadi, kita manfaatkan kembali, jadi ada *recycle water*. Jadi, airnya tidak kita gunakan seluruhnya kita ambil dari sungai, tapi *wastewater*-nya kita *recycle* kembali. Itu adalah program yang kami biaya sendiri, bukan dari PMN yang ini. Ini sudah jalan, Pak.

Kemudian, kita juga *venture* kepada, contohnya kalau di KBN kita punya ada yang di Cakung dan Marunda. Itu kita karena dari PDAM itu *enggak*, *enggak* mampu menyediakan tepat waktu, kita sekarang lagi *mengeksplor* untuk menggunakan air laut, Pak.

Jadi, sebisa mungkin kita memastikan bahwa kawasan industri yang kita di, yang ada ini berubah, Pak, menjadi kawasan industri yang *smart* dan *green*. Karena bukan hanya bahwa itu memang tren, tapi itu justru meningkatkan daya saing kawasan industri kita, *gitu*, Pak.

Di KBN, Pak. Jadi, di, apa, Kawasan Berikat Nusantara yang ada di Marunda dan Cakung. Itu karena dekat kita bisa ambil dari air laut. Sekarang



teknologinya sudah lumayan baik, Pak, jadi sehingga, sehingga *cost of production*-nya juga murah, kira-kira *gitu*, Pak. Itu, Pak, izin saya sampaikan.

Kemudian, tadi kami sudah jawab terkait dengan penugasan. Tadi dari Pak Sarmuji juga, karena beliau *nggak* ada, saya izin lewat. Dengan Pak Faisol juga ini karena Pak Ketua, saya jawab, Pak, ya. Ya Pak, izin Pak, ini memang kami pilih beberapa kawasan yang membawa dampak yang sangat *multiplier gitu*, Pak, dan kita bisa *recycle*. Karena *kan* kita punya ada, kita ada 7, Pak, 7 kawasan, sekarang kita ambil 2 untuk kita ini *kan*, untuk kita berikan *equity injection* untuk nantinya kita modifikasi ke tempat yang seperti saya sampaikan tadi. Ini adalah katalisator dan kita akan *recycle*, Pak.

Jadi, ada dana yang kita pakai untuk me-*recycle* untuk masuk ke kawasan-kawasan yang lain juga. Karena, izin, Pak Aria, sekaligus menjawab Pak Aria, karena kawasan industri kita punya enam, satu itu baru, Pak, yaitu yang di Batang. Nah, kalau yang di Batang, Pak, itu rusun pekerja itu dibangun di dalam, Pak, 10, kita bangun 10 rusun melalui PUPR, itu jadi semuanya ada di dalam.

Tapi untuk kawasan industri yang lain, itu sedang kita *redesign* ulang, karena *udah* ada, Pak, *udah* terjadi karena kami menerimanya sudah begitu istilahnya. Itu kita dari sisi bisnis modalnya pun kita tata ulang, Pak. Nah, memang, memang benar, Pak, satu kawasan industri itu, bangkitan atau *multiplier effect* untuk kawasan, untuk sekitarnya *tuh* tinggi sekali.

Sebagai contoh tadi kalau kita pakai KBN itu, satu kawasan itu bisa 50.000, Pak, pekerja. Tapi memang, tadi efeknya, efek negatifnya itu menciptakan *slum*. Nah, itu yang coba kita nanti kita, karena kita masih punya tanah kosong, Pak, ada beberapa mungkin nanti kita bangun, *kan* rusun supaya mereka bisa di kawasan industri saja, bukan hanya untuk pekerjaannya tapi untuk *tenant*-nya juga menjadi lebih lebih cepat. Jadi, logistiknya lebih gampang, kira-kira itu, Pak.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Oke.

**DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (YADI JAYA RUCHANDI):**

Itu yang program-program yang sedang kita kerjakan.

Izin, Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Cukup, ya?



Terima kasih jajaran Direksi untuk PT PLN, PT LEN, dan PT Danareksa yang telah merespons beberapa hal dari pendalaman pertanyaan kawan-kawan sejak kemarin sampai hari ini.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN, Direktur Utama PT LEN Industri, Direktur Utama PT Danareksa Terkait Usulan Penyertaan Modal Negara Tahun 2025 Rabu, 10 Juli 2024. Kita akan ambil keputusan dari draf keputusan pada rapat hari ini, RDP ini.

Yang pertama,

1. Komisi VI DPR RI menerima, kita belum menyetujui ya, menerima penjelasan dari perusahaan BUMN terkait usulan Penyertaan Modal Negara tahun 2025, yakni:
  - a. PT PLN sebesar Rp 3.000.000.000.000,00,- (*Tiga Triliun Rupiah*) dalam rangka Program Listrik Desa.
  - b. PT LEN Industri (Persero) sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
  - c. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka pengembangan usaha.
2. Komisi VI DPR RI dapat memahami dasar, latar belakang dan peruntukan dari PMN tersebut. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT PLN, PT LEN Industri, PT Danareksa untuk memperhatikan apabila PMN ini disetujui setelah rapat kerja dengan menteri nanti jam 08.00 kalau *enggak* salah, karena ini jam tujuh sudah waktunya tinggal lima menit kurang lebih nanti malam. Kalau *toh* disetujui:
  - a. Efektivitas penggunaan Penyertaan Modal Negara;
  - b. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan PMN;
  - c. Potensi Risiko Moral *Hazard*, ada *excess nih* biasanya;
  - d. Pengawasan penggunaan PMN yang ketat;
  - e. Peningkatan tata kelola perusahaan yang baik. Pengalamannya *trocoh* bocor, Pak. Bablas, kemarin saya lihat dari setiap pembelian PMN tidak menghasilkan sesuatu kecuali hanya tambal sulam untuk menutup hutang dan gaji karyawan. Sekali lagi, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan manajemen Risiko.
  - f. Evaluasi secara berkala. Evaluasi secara berkala ini oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk kita dalam rangka fungsi pengawasan di DPR.
3. Komisi VI DPR RI mendorong PT PLN (Persero), apabila disetujui dalam penggunaan PMN untuk melaksanakan hal sebagai berikut, aspirasi dari kawan-kawan Komisi VI maupun dari apa yang diajukan oleh PLN:
  - a. Membangun infrastruktur kelistrikan Perdesaan untuk mencapai rasio elektrisasi 100%;
  - b. Mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan dan jaringan tegangan rendah. Pak Adi, *gimana*, Pak Adi? Ini, *oke*.



- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi tarif listrik berkeadilan.

Tadi, janji *enggak* naik atau masih dipertimbangkan, Pak? Tarif pemerintah ya, implementasi tarif listrik berkeadilan, tapi juga tidak lepas dari masukan dari PLN, Pak.

- d. Melaksanakan efisiensi operasional. Ini penting, ya;
  - e. Meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan.
4. Komisi VI DPR RI mendorong PT LEN Industri dalam penggunaan PMN, apabila disetujui nanti dalam rapat kerja untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
    - b. Mengembangkan industri pertahanan nasional;
    - c. Mengurangi beban impor. Ini penting tadi;
    - d. Meningkatkan efisiensi biaya operasional.

Bagaimana, Pak Dirut? *Oke*.

5. Komisi VI DPR RI mendorong PT Danareksa (Persero) dalam penggunaan PMN, apabila disetujui untuk memberikan dampak positif bagi perusahaan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Jadi, memang supaya tumbuh, Pak, kita *ngasih* Danareksa itu supaya perekonomian tumbuh, tidak justru menurunkan kinerja dari pertumbuhan ekonomi. Dengan penguatan modal, ekspansi usaha, tadi yang Bapak uraikan, juga peningkatan investasi yang betul-betul berdampak pada aspek pertumbuhan ekonomi. Kemudian, percepatan transformasi dan pengembangan ekosistem BUMN seperti yang Bapak paparkan.

**WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

BUMN di bawah Danareksa.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP):**

Pengembangan BUMN di bawah Danareksa

Nah, yang terpenting 6 ini, Pak.

6. Komisi VI DPR RI akan mendalami usulan PMN Tahun 2025 yang diajukan oleh PT PLN, PT LEN Industri dan PT Danareksa tersebut untuk selanjutnya dibahas dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN.

Habis ini kita akan dapat internal untuk memutuskan terkait dengan materi rapat dengan Pak Menteri.



**Bapak/Ibu, dan  
Teman-teman sekalian,**

Kita akan akhiri rapat pada hari ini.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para jajaran Direksi PT Perusahaan Listrik Negara, Direktur Utama PT LEN, dan Direktur PT Danareksa, serta atas nama Pimpinan Komisi VI kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI yang telah mengikuti acara rapat dengar pendapat ini hingga selesai.

Demikian rapat kami tutup.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.56 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si.**  
NIP. 197104071992032001

